

LKJiP 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Jalan Lingkar Binuang RT. 10 RW 03 Binuang Tapin 71183

Email : humas.kec.binuang@gmail.com

Website : <http://binuang.profile.tapinkab.go.id/>

WhatsApp : 0812-8666-1813

Instagram : [kecamatan.binuang.tapin](https://www.instagram.com/kecamatan.binuang.tapin)

Facebook : Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

Youtube : [@kecbinuangkabtapin](https://www.youtube.com/@kecbinuangkabtapin)

TikTok : [kecamatanbinuang](https://www.tiktok.com/@kecamatanbinuang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, keberhasilan/kegagalan, serta kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKjIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota tim dalam penyusunan LKjIP serta pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LKjIP ini dapat diselesaikan.

Binuang, Maret 2024

Camat Binuang



H. HENDERIYAWOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
Penata Tk I / III d
NIP. 19860101 201101 1 015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Oleh karena itu Camat Binuang berkewajiban untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangannya kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok Kecamatan Binuang yang harus dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah (Bupati) dan *stakeholder* lainnya.

LKjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Binuang adalah 99,98% dan termasuk kategori “Sangat Tinggi”. Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Binuang ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategis yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Binuang Tahun 2023, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	lii
Daftar Lampiran	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	18
1.4 Landasan Hukum	19
1.5 Sistematika.....	20
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	30
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.2 Realisasi Anggaran	106
BAB. IV PENUTUP	110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023
3. Matriks Renstra Kecamatan Binuang 2018-2023
4. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Binuang Tahun 2022
5. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Binuang Tahun 2022
6. Daftar Prestasi Kecamatan Binuang Tahun 2023
7. Surat Keputusan Penetapan TIM SAKIP Kecamatan Binuang Tahun 2023
8. Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binuang Tahun 2023
9. Monev Rencana Aksi dan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023
10. SOP Monitoring Kinerja SKPD
11. SOP Pengukuran Data Kinerja SKPD
12. SOP Pengumpulan Data Kinerja SKPD
13. Pohon Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023
14. Cascading Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023
15. Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Binuang Tahun 2023
16. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif per Sub Kegiatan Kecamatan Binuang Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Binuang melaksanakan rencana strategis dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Binuang. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKjIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Binuang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Binuang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aspek Strategis merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Dengan Visi, Misi, strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Binuang merupakan salah satu struktur dan tata kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten

Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, maka dijelaskan :

A. Kedudukan

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dan dipimpin oleh Lurah. Yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

B. Tugas dan Fungsi

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
3. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;
5. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

8. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sekretariat / Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kecamatan;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan; dan

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penataysahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Kecamatan yang terintegrasi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah bahan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;

- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urutan pengangkatan kepegawaian, dokumentasi berkas kepegawaian, absen dan cuti kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan kecamatan serta fasilitasi lainnya;
- m. Melakukan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kecamatan;
- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;

- l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ditingkat Kecamatan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Kertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi:
 1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar

- Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
 3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
 4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
 - e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Perekonomian mempunyai tugas

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian. Uraian tugas Seksi Perekonomian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan program perekonomian di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa dan Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi dibidang perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan. Uraian tugas Seksi Pembangun sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan;

- f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak dan membahayakan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat,

- penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat, dan bahan berbahaya lainnya;
 - g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
 - h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
 - i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
 - j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
 - l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, SKPD Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sampai akhir tahun 2023 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian: 11 ASN di Kecamatan Binuang, 4 ASN di Kelurahan Raya Belanti, 5 ASN di Kelurahan Binuang, dan 5 ASN di Kelurahan Karang Putih sebagaimana pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Data PNS Kecamatan Binuang
Tahun 2023

No	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat dan Golongan	Jabatan	Keterangan
KECAMATAN BINUANG					
1	H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep, Ners, MM NIP. 198601012011011015	Strata II	Penata Tk. I / III d	Camat	Struktural / Eselon III a
2	Esti Sapto Rini, SP, MM NIP.197210132014062001	Strata II	Penata / III c	Sekretaris Camat	Struktural / Eselon III b
3	Hj. Darmiyati Ayu, S.Sos, M.AP NIP.197010091993032007	Strata II	Pembina / IV a	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Struktural / Eselon IV a
4	Edy Trirahmady, S.Pd.I NIP.198007272009041005	Strata I	Penata Tk. I / III d	Kasi Trantib	Struktural / Eselon IV a
5	Maya Rahman, S.Kep,Ners NIP.198708122010012027	Strata I	Penata Tk. I / III d	Kasi Pemerintahan	Struktural / Eselon IV a
6	Hj. Aminah, S.Pd,MM NIP.198009012009042002	Strata II	Penata / III c	Kasi Perekonomian	Struktural / Eselon IV a
7	Jurhana Yati, S.AP NIP.197602122010012004	Strata I	Penata Muda Tk. I / III b	Kasi Pembangunan	Struktural / Eselon IV a
8	Nelly Hartati, S.Pd,MM NIP.198808242015032002	Strata II	Penata / III c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Struktural / Eselon IV b

9	Erwan Aspani, S.Kom NIP.198506092014031003	Strata I	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Struktural / Eselon IV b
10	Mahda Yuniar Emha, A.Md NIP.198811032020122005	Diploma III	Pengatur / II c	Pengelola Program dan Kegiatan	Fungsional Umum
11	Syariansyah NIP.197208272014061001	SLTA / Sederajat	Pengatur / II c	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum
KELURAHAN RAYA BELANTI					
1	Jaidi, A.Md.Kes NIP.196610151988121002	Diploma III	Penata Tk. I / III d	Lurah	Struktural / Eselon IV a
2	Chairun Nisa, SE NIP.198303262011012008	Strata I	Penata Tk. I / III d	Sekretaris Lurah	Struktural / Eselon IV b
3	Anjar Pratama, S.Kep,Ners, MM NIP.198807092010011004	Strata II	Penata / III c	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Struktural / Eselon IV b
4	Andri Perdana, A.Md NIP.198912242011011003	Diploma III	Penata Muda Tk. I / III b	Kasi Pemerintahan	Struktural / Eselon IV b
KELURAHAN BINUANG					
1	Hj. Umie Amelea Artha, SKM,MM NIP.197108081992032007	Strata II	Pembina /IV a	Lurah	Struktural / Eselon IV a
2	Purnama Yanti, S.AP,MM NIP.198305272012122003	Strata II	Penata Muda Tk. I / III b	Sekretaris Lurah	Struktural / Eselon IV b
3	Rahmatullah Faisal, S.Kom NIP.198112012009041002	Strata I	Penata Tk. I / III d	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Struktural / Eselon IV b
4	Aneta Fahriana, SE NIP. 197812082006042018	Strata I	Penata Tk. I / III d	Kasi Pemerintahan	Struktural / Eselon IV b
5	Arpah, A.Md NIP. 199608172020122012	Diploma III	Pengatur / II c	Pengelola Program dan Kegiatan	Fungsional Umum
KELURAHAN KARANGAN PUTIH					
1	Duana, A.Ma.Pd NIP.196512111986081002	Diploma II	Pembina / IV a	Plt. Lurah	Fungsional Umum
2	Herru Sutarmiyah, S.AP NIP. 197504292012122001	Strata I	Penata Muda Tk. I / III b	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Struktural / Eselon IV b
3	Roesby Elmathin, A.Md NIP.198909272011011004	Diploma III	Penata Muda / III a	Pengadministrasi Umum / Plt Kasi Pemerintahan	Fungsional Umum
4	Ridha Rahmawati, A.Md NIP. 199107092020122006	Diploma III	Pengatur / II c	Pengelola Program dan Kegiatan	Struktural / Eselon IV b
5	Bambang Ariyanto NIP.197212101997031007	SLTA / Sederajat	Pengatur Tk. I / II d	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum

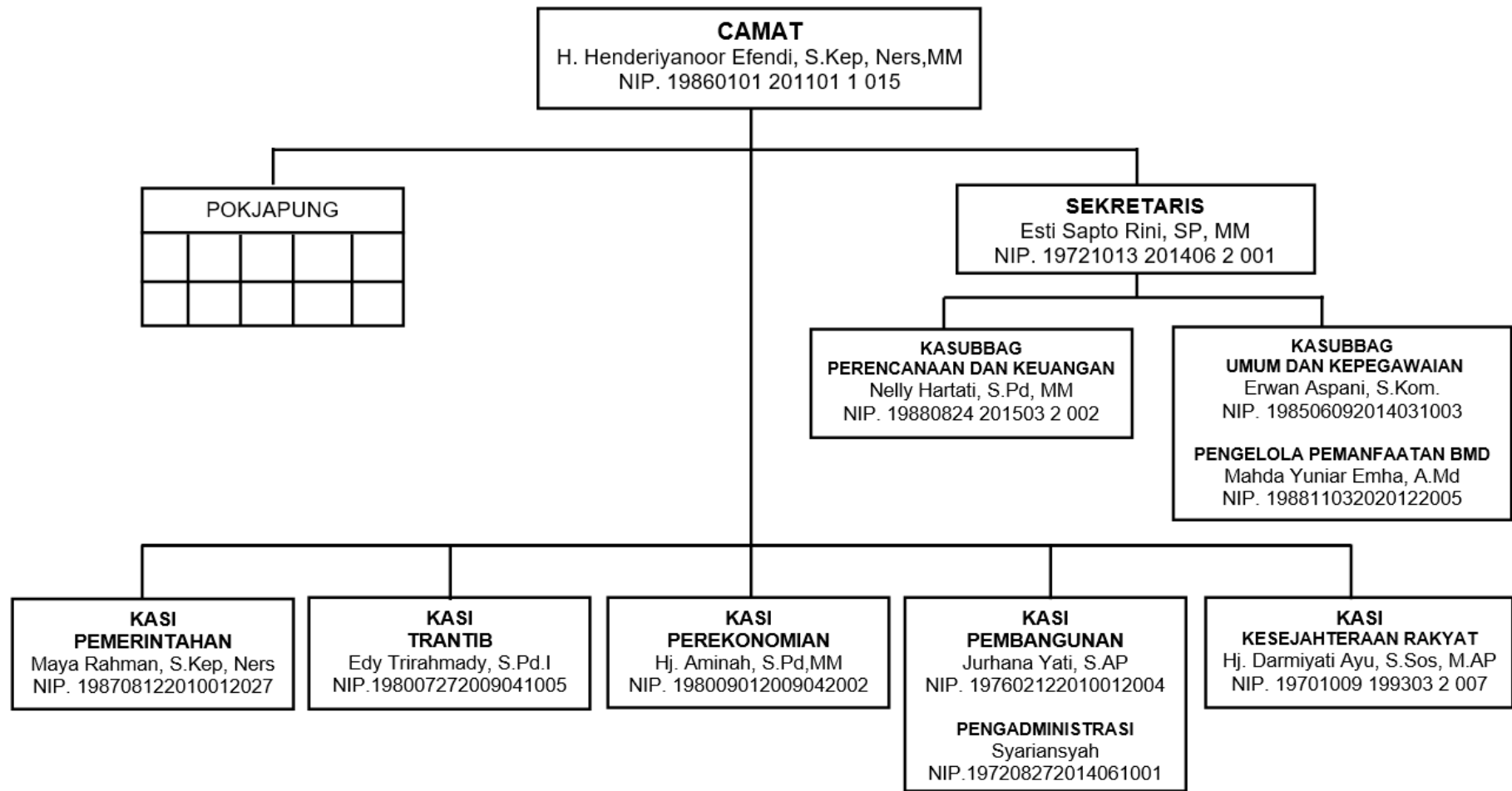
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Binuang Tahun 2023

Dari tabel tersebut kualifikasi pendidikan tertinggi ialah Strata II sebanyak 8 orang, diikuti Strata I sebanyak 8 orang, Diploma III sebanyak 6 orang, Diploma II sebanyak 1 orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 2 orang.

Pangkat dan golongan tertinggi ialah Pembina / IV a sebanyak 3 orang, diikuti Penata Tk. I / III d sebanyak 7 orang, Penata / III c sebanyak 4 orang, Penata Muda Tk. I / III b sebanyak 4 orang, Penata Muda / III a sebanyak 1 orang, Pengatur Tk. I / II d sebanyak 1 orang, dan Pengatur / II c sebanyak 5 orang.

Adapun jumlah pejabat struktural sebanyak 19 orang dan pejabat fungsional umum sebanyak 6 orang. Pejabat struktural terdiri dari eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV a sebanyak 7 orang, dan eselon IV b sebanyak 10 orang.

Struktur organisasi SKPD Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Binuang

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan kedepan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **good governance and clean government** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi, secara umum dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dibidang pelayanan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial (cara berpikir yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan kebiasaan yang menggunakan konsep keruangan) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup stretegi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binuang sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan perihal pelaporan dan jenis dokumen;
8. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin

1.5 Sistematika

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) yang disusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 - 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
 - 1.4 Landasan Hukum
 - 1.5 Sistematika
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - 2.1 Rencana Strategis
 - 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023
 - 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2 Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP
 - 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.

Rencana strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Kantor Kecamatan Binuang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Binuang harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin

sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	Sejahtera	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu

		menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.
--	--	---

Sedangkan perumusan misi Pemerintah Kabupaten 5 tahun kedepan, berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good governance and Clean Government)

Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut:

1. Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan);
2. Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

Sedangkan untuk mencapai visi Kecamatan Binuang tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Misi Pertama : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima

2. Misi Kedua : Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Binuang Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Binuang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan/Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kecamatan Binuang 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
5. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100	100	100	100	100

		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	72,82
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	-	18,9

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidakberhasilan. Jika ditemukan, maka

ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Binuang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Binuang serta RPJMD Kabupaten Tapin. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Binuang yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Binuang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Binuang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	89,00
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	%	100
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	%	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	100
3	Meningkatnya	Persentase Desa	%	100

	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan		
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	%	100
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	%	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	72,82
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	18,9

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan dengan Tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Cara Perhitungan serta Penjelasan Indikator Kerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survei tingkat kepuasan pelayanan	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)	Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan yang masuk}} \times 100 \%$	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)	Agar Dapat Mengetahui Data dan Informasi Hasil dari Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori indeks Kepuasan Masyarakat (Minimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik)
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100 \%$	Camat	Rekomendasi diselesaikan (Semua Kasi)	Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh Kecamatan yang Memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100 \%$	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Semua Kasi)	Pengaduan yang diselesaikan Baik melalui Mediasi atau dengan cara-cara lain
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa yang Ada di Kecamatan}} \times 100 \%$	Camat	Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)	Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang	$\frac{\text{Jumlah Desa dengan Pengelolaan Aset Desa sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa yang Ada di Kecamatan}} \times 100 \%$	Camat	Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)	Pengelolaan Aset Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

		sesuai ketentuan				
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	(Jumlah Desa Administrasi Kependudukan yang baik / Jumlah Desa yang Ada di Kecamatan) x 100 %	Camat	Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik (Kasi Pemerintahan)	Data Kependudukan Terverifikasi yang diterima dari Desa/Kelurahan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)	<p>Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Bobot Maksimal Komponen yang dinilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kinerja=30 - Pengukuran Kinerja=30 - Pelaporan Kinerja=15 - Evaluasi Internal=25
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Camat	Nilai IP-ASN (Sekcam)	Berdasarkan Permen PAN &RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Binuang telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Binuang dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Binuang tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023 diuraikan pada Tabel 2.4, dan yang berjenjang terlampir :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Eselon 3 III a (Camat)	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	89,00
		Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100%
			Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100%
			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%
2	Eselon III b (Sekretaris Kecamatan)	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Pengukuran Kinerja) (Pelaporan Kinerja) (Evaluasi Internal)	Score 24.58 19.08 10.62 18.54
		Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 Poin
3	Esselon IV a (Kasi Pemerintahan)	Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang Memenuhi Syarat untuk diterbitkan	100%
		Terlaksananya Pembinaan tentang Dokumen Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen Pemerintahan Desa yang sesuai Ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)	100%
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Laporan APBDes yang Lengkap dan Capaian Serapan Minimal 75%	100%
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa dengan Inventarisasi Aset Desa yang Baik	100%
		Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan di Desa	Persentase Desa yang tertib Melakukan Laporan Mutasi Kependudukan yang Tepat Waktu	100%
4	Esselon IV a (Kasi Perekonomian)	Tersedianya Pelayanan Rekomendasi izin usaha	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%
5	Esselon IV a (Kasi Kesra)	Tersedianya Rekomendasi Pelayanan Administrasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Pelayanan Administrasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
6	Esselon IVa (Kasi Trantib)	Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat	Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%
7	Esselon IVa (Kasi Pembangunan)	Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	75%
8	Esselon IV b (Sub bagian Umum & Kepegawaian)	Meningkatnya ASN yang Berkualitas	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	2%
		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan Pelayanan administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%
9	Esselon IV b (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Perencanaan Kinerja atas Rekomendasi dari Mitra Kerja Bappelitbang	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
			Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat Waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin:

Tabel 2.5

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja	24.58
		Nilai Komponen AKIP Pengukuran Kinerja	19.08
		Nilai Komponen AKIP Pelaporan Kinerja	10.62
		Nilai Komponen AKIP Evaluasi Internal	18.54
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100 %
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %

		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100 %
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	2 %
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80 %
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80 %
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80 %
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu	100%
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tapin Tengah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	100%
		Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Masyarakat
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	100%
		Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%

1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani	
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang

VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%
		Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)	100%
		Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 80%	100%
		Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik	100%
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen
5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Binuang.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Binuang tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Binuang tahun 2023 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pada awal Tahun Anggaran 2023, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Binuang telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur, Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus pada Tabel 3.1.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari

masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.1.1 Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun ini

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Binuang juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan realisasinya. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	89,00 poin	89,03 poin	100,03%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam dan Kasi)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100%	100%	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam dan Kasi)
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Rekomendasi diselesaikan (Semua Kasi)
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Semua Kasi)
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)

		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100%	100%	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik (Kasi Pemerintahan)
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score	72,65 Score	99,77%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,9 Poin	18,9 Poin	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Nilai IP-ASN (Sekcam)

Berdasarkan hasil capaian atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binuang Tahun 2023, terdapat 5 (Lima) Sasaran Strategis dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja, Adapun Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2023 Kecamatan Binuang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pencapaian sasaran yang pertama menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Binuang melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.
Capaian atas Sasaran Strategis 1 Kecamatan Binuang
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	89,00 Poin	89,03 Poin	100,03 %	91 % ≤ 100% Sangat tinggi	Laporan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (Sekcam, Semua Kasi
Rata-Rata Capaian IKU					100,03 %		

Capaian Sasaran Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Realisasi untuk tahun 2023 sebesar 89,03 dari target sebesar 89,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,03 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Binuang menaikkan target dari nilai IKM 88,00 di tahun 2022 menjadi nilai IKM 89,00 di tahun 2023.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi, Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Binuang menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan serta menggunakan google form yang dapat diisi masyarakat di link <https://tinyurl.com/SKMKECBINUANG2023> secara online atau dengan *scan* barcode yang tersedia di ruang pelayanan Kecamatan Binuang, *website*, dan *Instagram* Kecamatan Binuang seperti pada gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Binuang Online

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Hasil survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di tahun 2023 pada Kecamatan Binuang dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 menunjukkan tingkat kualitas yang **Sangat Baik** dengan nilai **SKM 89,03**.

Tabel 3.4
Nilai IKM Per Unsur Pelayanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	86.00	87.00	86.00	99.29	88.50	88.43	88.07	86.00	92.00
Kategori	B	B	B	A	A	A	B	B	A
IKM Unit Layanan	89.03 (A atau Sangat Baik)								

Diagram 3.1
Nilai IKM Per Unsur Pelayanan



Berdasarkan table dan diagram diatas, Kecamatan Binuang mendapat nilai 86 untuk unsur Persyaratan (Baik), 87 untuk unsur Prosedur (Baik), 86 untuk unsur jangka waktu penyelesaian (Baik), 99,29 untuk Tarif (Sangat Baik), 88,05 untuk Produk (Sangat Baik), 88,43 untuk Kompetensi (Sangat Baik), 88,07 untuk Perilaku (Sangat

Baik), 86 untuk Sarana Prasarana (Baik), dan 92 untuk Pengaduan (Sangat Baik).

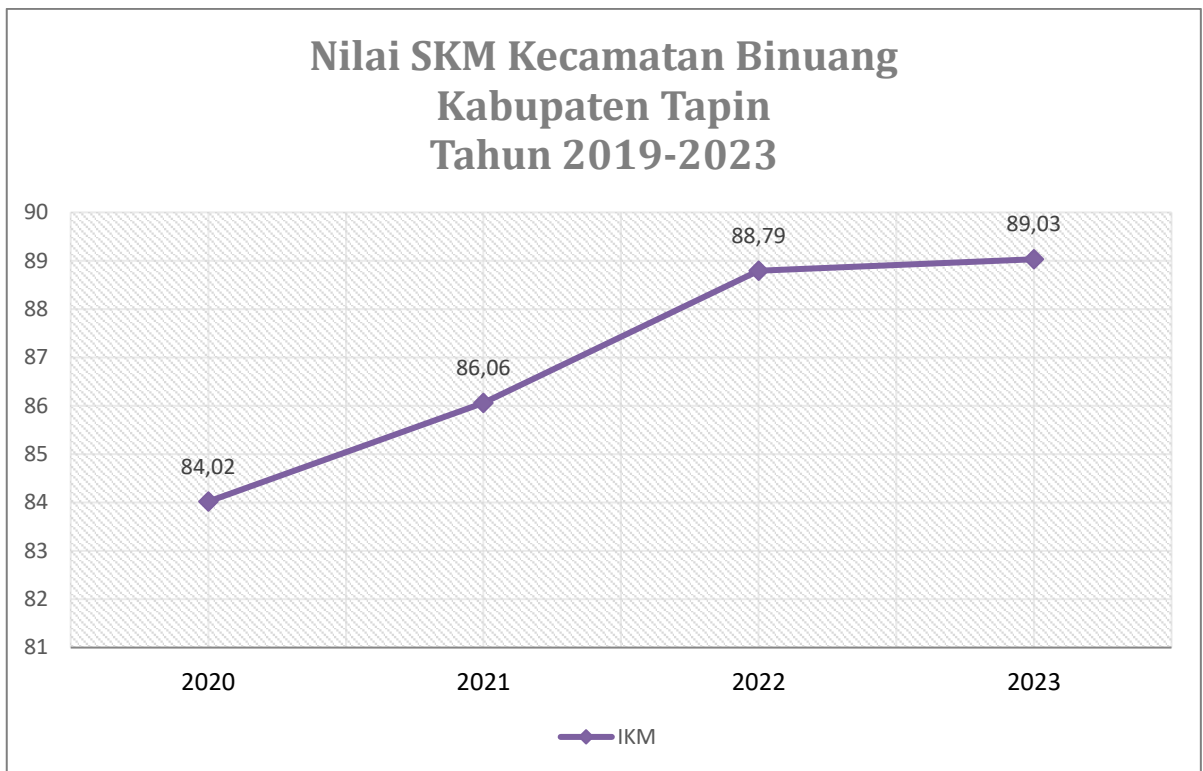
Untuk 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah yakni Persyaratan, Jangka Waktu Penyelesaian, dan Prosedur, Kecamatan Binuang telah membuat rencana tindak lanjut dan merealisasikan rencana tersebut di Tahun 2023 dengan realisasi 100%. Adapun Rencana Tindak Lanjut dan Realisasinya dijabarkan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Matriks Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Binuang Tahun 2023

No	Prioritas Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Rencana Jangka Waktu Realisasi	Realisasi Tindak Lanjut	Waktu Realisasi	Status
1	Persyaratan	Melakukan sosialisasi persyaratan pelayanan melalui media non elektronik dan elektronik	Oktober 2023	Kecamatan Binuang telah mensosialisasikan persyaratan pelayanan melalui akun media sosial <i>WhatsApp</i> , <i>Instagram</i> , dan <i>Website</i> serta memasang papan spanduk informasi pelayanan di Kantor Kecamatan Binuang. Informasi persyaratan juga ditampilkan di layar televisi ruang pelayanan.	Oktober 2023	Selesai
2	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menambah Personil Petugas Pelayanan ➢ Mengganti modem biasa dengan modem orbit agar jaringan internet lebih stabil 	Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kecamatan Binuang telah menambah Personil Petugas Pelayanan agar pelayanan bisa diselesaikan lebih cepat dan efektif. ➢ Kecamatan Binuang telah mengganti modem biasa dengan modem orbit 	Oktober 2023	Selesai

				agar jaringan internet lebih stabil terutama untuk pelayanan perekaman e-KTP		
3	Prosedur	Melakukan sosialisasi prosedur pelayanan melalui media non elektronik dan elektronik	Oktober 2023	Kecamatan Binuang telah mensosialisasikan persyaratan pelayanan melalui akun media sosial WhatsApp, Instagram, dan Website serta memasang papan spanduk informasi pelayanan di Kantor Kecamatan Binuang. Informasi persyaratan juga ditampilkan di layar televisi ruang pelayanan.	Oktober 2023	Selesai
		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	Oktober 2023	Rapat Internal Monitoring dan Evaluasi terhadap prosedur pelayanan dilaksanakan pada Selasa 31 Oktober 2023 dihadiri seluruh pegawai Kantor Kecamatan Binuang guna memastikan prosedur pelayanan telah berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.	Oktober 2023	Selesai

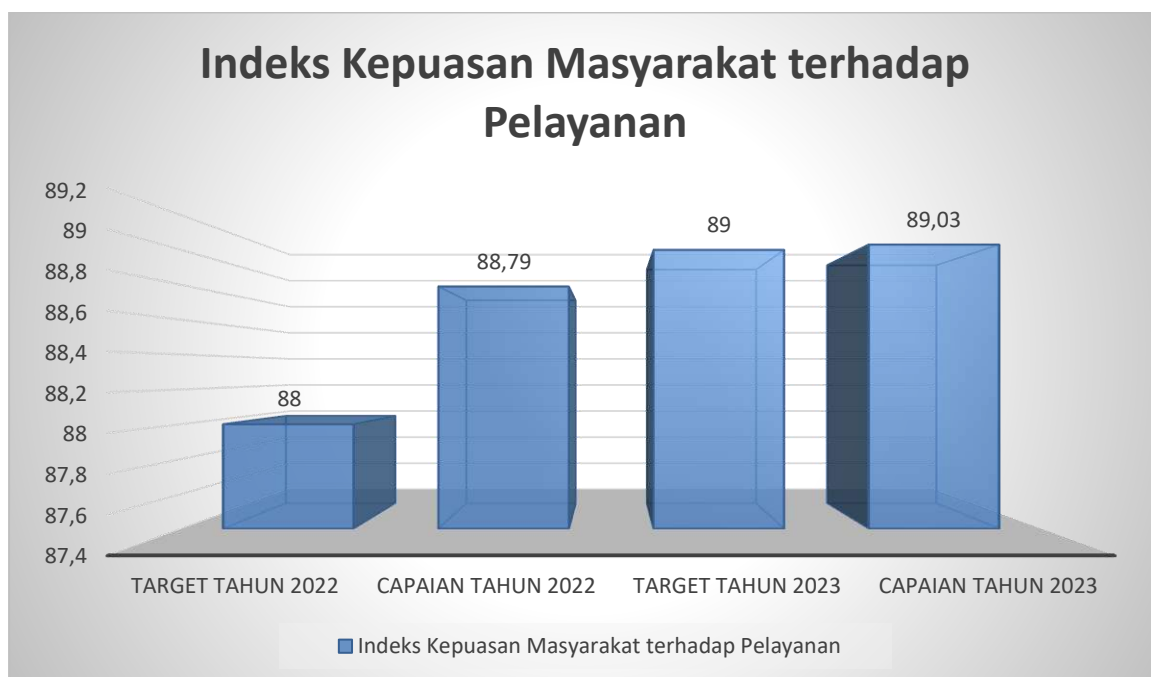
Diagram 3.2
Nilai SKM Kecamatan Binuang 2020 s.d 2023



Adapun perbandingan nilai SKM Kecamatan Binuang Tahun 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Diagram 3.2. Berdasarkan Diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023 pada Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, mulai dari 84,02 di tahun 2020; 86,06 di tahun 2021; 88,79 di tahun 2022; hingga 89,03 di tahun 2023.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra dapat dilihat pada Diagram 3.3. Dari diagram tersebut terlihat bahwa pada Kecamatan Binuang selalu dapat melampaui target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan. Tahun 2022 Kecamatan Binuang meraih nilai IKM 88,79 dari target 88,00 dan Tahun 2023 meraih nilai IKM 89,03 dari target 89,00.

Diagram 3.3
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan
Tahun 2023 dan Tahun Renstra



Untuk Tahun 2023 Kecamatan Binuang mewakili Kabupaten Tapin menjadi Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2023. Kecamatan Binuang mendapat predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori **“Sangat Baik”** berdasarkan hasil PEKPPP Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2023.



Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2023

Predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperoleh Kecamatan Binuang dengan memenuhi 6 (enam) aspek Penilaian PEKPPP, yakni 1) kebijakan pelayanan publik, 2) profesionalisme SDM, 3) sarana dan prasarana, 4) sistem informasi pelayanan publik, 5) konsultasi dan pengaduan, serta 6) inovasi pelayanan publik. Video Profil Pelayanan Publik Kecamatan Binuang dapat dilihat di kanal *Youtube* Kecamatan Binuang dengan link https://www.youtube.com/watch?v=bZSKOj_nYPk

1. Kebijakan Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan

Kecamatan Binuang telah memiliki Standar Pelayanan (SP) untuk semua jenis pelayanan dan mengacu pada PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014. Standar Pelayanan tersebut setiap tahunnya dilakukan monitoring dan evaluasi serta dilakukan

perubahan apabila diperlukan sesuai kondisi dan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan perubahan Standar Pelayanan, Kecamatan Binuang melibatkan 5 (lima) unsur masyarakat yakni: 1) Masyarakat pengguna layanan, 2) Ahli/Praktisi/Akademisi, 3) Instansi Terkait, 4) Organisasi Masyarakat Sipil, dan 5) Media Massa.

Standar Pelayanan juga sudah dipublikasikan di media cetak (banner di ruang pelayanan), Media Elektronik (Layar Monitor Ruang Pelayanan), media sosial (*Instagram* Kecamatan Binuang kec.binuang.tapin), *Website* Kecamatan Binuang (<https://binuang.profile.tapinkab.go.id>) , dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Nasional (<https://sippn.menpan.go.id/>).

b. Maklumat Pelayanan

Kecamatan Binuang memiliki Maklumat Pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta telah dipublikasikan di media cetak (poster di ruang pelayanan), media elektronik (layar monitor ruang pelayanan), media sosial (*Instagram* Kecamatan Binuang), *Website* Kecamatan Binuang, dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Nasional.

c. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan Kecamatan Binuang 1 tahun sekali. Untuk Tahun 2023 nilai yang didapat ialah 89,03. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, rencana tindak lanjut serta Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Binuang telah dipublikasi di media cetak (poster di ruang pelayanan), media elektronik (layar monitor ruang pelayanan), media sosial (*Instagram* Kecamatan Binuang), dan *Website* Kecamatan Binuang. Rencana tindak lanjut hasil SKM 2023 telah terealisasi 100%.

2. Profesionalisme SDM

a. Waktu Pelayanan yang Memudahkan Pengguna Layanan

Kecamatan Binuang memberikan waktu pelayanan yang memudahkan Masyarakat pengguna layanan dan telah

dipublikasi media cetak (poster di ruang pelayanan), media elektronik (layar monitor ruang pelayanan), media sosial (*Instagram* Kecamatan Binuang), dan *Website* Kecamatan Binuang. Adapun waktu pelayanan Kecamatan Binuang sebagai berikut:

- 1) Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat Binuang Nomor: 000.9.3.4/030/BNG/SKRT/IV/2023, tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu Pada Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.
- 2) Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (*shift*);
- 3) Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu (misalnya perekaman e-KTP dan Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil).

b. Motivasi Kerja

Dalam hal profesionalisme SDM, Kecamatan Binuang telah memiliki mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan yakni: 1) Pemberian Penghargaan, 2) Pemberian Kesempatan untuk Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop, 3) *Team/Capacity Building*, dan *Family Gathetring*. Mekanisme tersebut dipublikasikan di *Website*, *Instagram* dan kanal *Youtube* Kecamatan Binuang: [@kecbinuangkaptapin](https://www.instagram.com/kecbinuangkaptapin).

c. Kode Etik Pegawai

Kecamatan Binuang memiliki Kode Etik Pegawai yang tertuang dalam Keputusan Camat Binuang Nomor: 800.1.6.1/033/BNG/PEG/IV/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Kode Etik Pegawai Pada Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

d. Pemberian Penghargaan

Kecamatan Binuang memiliki kriteria pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan yang berprestasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat Binuang Nomor: 000.9.3.4/032/BNG/SKRT/IV/2023, tanggal 26 April 2023

tentang Kebijakan Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Pegawai Pada Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

e. Budaya Pelayanan

Kecamatan Binuang telah menerapkan budaya pelayanan yang baik. Petugas pelayanan memakai seragam, identitas nama, pin BINUANG BABUNGAS, menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun), serta menerapkan slogan pelayanan RIMPI (Ramah, Informatif, Melayani, Profesional, dan Ikhlas).

3. Sarana Prasarana

Kecamatan Binuang memiliki sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai mulai dari area parkir yang luas dan dilengkapi CCTV; Musola; Pojok Baca; toilet pria; toilet wanita; *front office*; hingga Ruang tunggu yang dilengkapi televisi layar besar, kipas angin dan wifi gratis. Tersedia pula sarana prasarana untuk kelompok rentan seperti kursi roda, toilet khusus difabel, tangga ramp, pojok bermain anak, kursi tunggu dan loket prioritas, dan ruang laktasi. Profil sarana dan prasarana pelayanan publik Kecamatan Binuang dapat dilihat di Kanal *Youtube* Kecamatan Binuang [@kecbinuangkabtapin](https://www.youtube.com/channel/UCkEcbinuangkabtapin).

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Kecamatan Binuang memiliki sistem informasi pelayanan publik (SIPP) online berbasis website di <https://binuang.profile.tapinkab.go.id>. Pemutakhiran data di website maupun media sosial Kecamatan Binuang dilakukan setiap minggu oleh Tim Humas Kecamatan Binuang.

5. Konsultasi dan Pengaduan

Kecamatan Binuang memiliki sarana pengaduan baik tatap muka (datang langsung ke Kantor Kecamatan Binuang) maupun online melalui whatsapp, email, Instagram, Facebook, website Kecamatan Binuang hingga SP4N Lapar.

Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Pengaduan didokumentasikan dengan baik dan dipublikasikan di *website* dan *instagram* Kecamatan Binuang.

6. Inovasi Pelayanan Publik

Kecamatan Binuang memiliki beberapa inovasi pelayanan publik yakni 1) SIMPANAN BINUANG (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Binuang), 2) SUPERMAN (Sudut Permainan dan Edukasi Minat Anak), 3) SUNAMI (Sudut Nambah Ilmu), 4) WADUL (WA atau DM Untuk Laport), 5) SIJUMANJI (Aksi Jumat Masyarakat dan ASN Bikin Janji). Salah satu inovasi Kecamatan Binuang yakni SUPERMAN bahkan berhasil menjadi Finalis Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Pencapaian sasaran yang Kedua menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Binuang melalui Indikator Kinerja Utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian atas Sasaran Strategis 2 Kecamatan Binuang
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %	100%	100%	91 % ≤ 100% Sangat tinggi	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	91 % ≤ 100% Sangat tinggi	Rekomendasi diselesaikan (Sekcam, dan Semua Kasi)
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	91 % ≤ 100% Sangat tinggi	Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Semua Kasi)
Rata-Rata Capaian IKU					100 %		

Sasaran strategis 2 adalah meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : (1) Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B; (2) persentase rekomendasi yang diselesaikan; dan (3) persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan.

1) Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B

Capaian Sasaran Indikator kinerja Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal B

NO	UNSUR PELAYANAN	Kasi Pemerintahan	Kasi Perekonomian	Kasi Kesra	Kasi Trantib	Kasi Pembangunan	JUMLAH	RATA RATA	NILAI TERTIMBANG	INDEKS
1	Persyaratan	304	311	251	207	131	1204	3,44	0,38	86,00
2	Prosedur	305	303	257	213	140	1218	3,48	0,39	87,00
3	Ketepatan Waktu	304	311	251	207	131	1204	3,44	0,38	86,00
4	Kewajaran Biaya/Tarif	357	339	298	238	158	1390	3,97	0,44	99,29
5	Produk Pelayanan	303	304	285	200	147	1239	3,54	0,39	88,50
6	Kompetensi Pelaksana	278	291	271	239	159	1238	3,54	0,39	88,43
7	Perilaku Pelaksana	319	280	291	223	120	1233	3,52	0,39	88,07
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	304	311	251	207	131	1204	3,44	0,38	86,00
9	Penanganan Pengaduan	305	336	249	239	159	1288	3,68	0,41	92,00
	JUMLAH	2779	2786	2404	1973	1276	11218	3,56	0,40	89,03
	RATA-RATA	3,43	3,64	3,56	3,65	3,54	12,46	xxx	xxx	xxx
	NILAI TERTIMBANG	0,38	0,40	0,40	0,41	0,39	1,38	xxx	xxx	xxx
	INDEKS	85,77	91,05	89,04	91,34	88,61	311,61	xxx	xxx	xxx

Tabel 3.8
Nilai Interval

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	TIDAK BAIK
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	KURANG BAIK
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	BAIK
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	SANGAT BAIK

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal B adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B}}{\text{Jumlah Layanan Masyarakat yang ada (disurvey) di Kecamatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa semua layanan yang diberikan Kecamatan Binuang kepada masyarakat baik itu dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, Kasi Trantib, dan Kasi Perekonomian memiliki indeks minimal B (Baik). Bahkan layanan Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, Kasi Trantib, dan Kasi Perekonomian memiliki indeks A (Sangat Baik).

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.4
Perbandingan Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B
Tahun 2023 dan Tahun Renstra



2) Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan

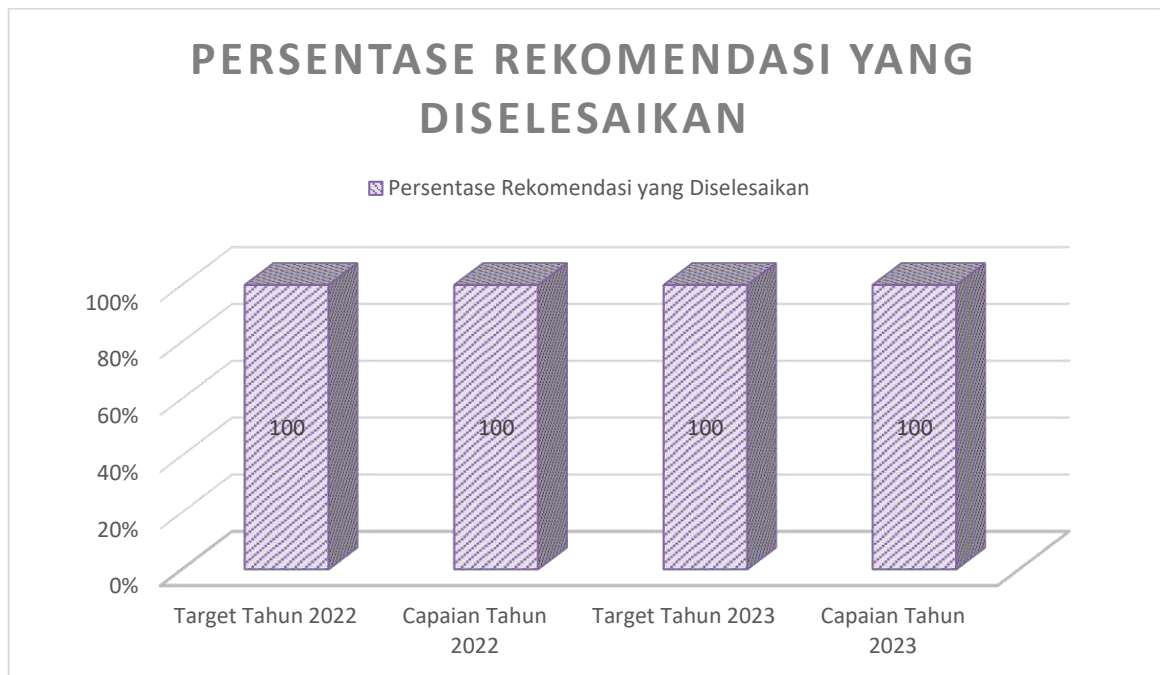
Capaian Sasaran indikator Kinerja Persentase Rekomendasi yang diselesaikan adalah 100% atau dalam arti semua jenis rekomendasi sudah diselesaikan. Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase rekomendasi yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Data Rekomendasi yang diselesaikan
SKPD Kecamatan Binuang

No	Jenis Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Rekomendasi Layanan Administrasi Perekonomian (Izin Usaha)	85	85	100%	• Kasi Perekonomian
2	Rekomendasi Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat (SKTM dan Dispensasi Nikah)	75	75	100%	• Kasi Kesra
3	Rekomendasi Layanan Administrasi Pemerintahan Desa (Pencairan APBDes)	96	96	100%	• Kasi Pemerintahan
4	Rekomendasi Usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	36	36	100%	• Kasi Pembangunan
5	Rekomendasi Layanan Administrasi tidak pernah dihukum	12	12	100%	• Kasi Trantib
JUMLAH		304	304	100%	

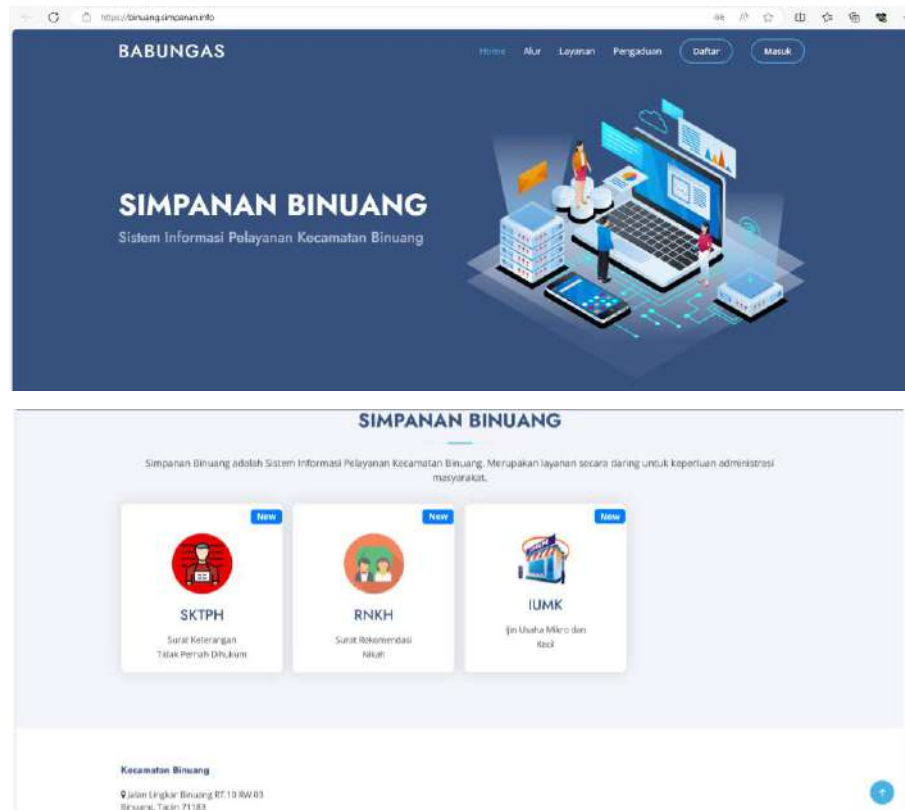
Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi yang diselesaikan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.5
Perbandingan Rekomendasi yang diselesaikan
Tahun 2023 dan Tahun Renstra



Untuk memberikan pelayanan rekomendasi yang lebih mudah, efektif, dan efisien, Kecamatan Binuang menghadirkan Inovasi SIMPANAN BINUANG (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Binuang) yang dapat diakses di <https://binuang.simpanan.info/>. SIMPANAN BINUANG merupakan layanan berbasis web yang melayani pembuatan 3 jenis rekomendasi yakni: 1) Rekomendasi Nikah, 2) Rekomendasi Izin Usaha, dan 3) Rekomendasi Tidak Pernah dihukum.

SIMPANAN BINUANG digagas oleh Camat Binuang sebagai aksi perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2023. Inovasi ini diluncurkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Dr. H. Sufiansyah, M.AP pada 27 November 2023 bertempat di Aula Kecamatan Binuang.



Gambar 3.3 Tampilan SIMPANAN BINUANG



Gambar 3.4 Launching SIMPANAN BINUANG oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Dr. H. SUFIANSYAH, M.AP

3) Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan

Kecamatan Binuang melayani pengaduan masyarakat dengan 2 (dua) metode yakni langsung dan tidak langsung. Layanan pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke Kantor Kecamatan Binuang Jl. Lingkar Binuang RT.10 RW.03 Binuang, Tapin 71183. Sedangkan untuk layanan pengaduan secara tidak langsung, Kecamatan Binuang menghadirkan inovasi WADUL (WA atau DM untuk Lapor). WADUL memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait permasalahan yang ada di Kecamatan Binuang dengan lebih cepat (*real time*) melalui WhatsApp, Website, dan media sosial Kecamatan Binuang.

Selain untuk menerima pengaduan masyarakat; WhatsApp, Website, dan media sosial Kecamatan Binuang juga dimanfaatkan untuk menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat. Ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penanganan pengaduan masyarakat.



Gambar 3.5 Tampilan WADUL

Capaian Sasaran Indikator kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti. Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Data Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti Tahun 2023

No	Jenis Keluhan/Pengaduan	Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Bangunan di pinggir Jalan A Yani Desa Tungkap Kecamatan Binuang Memasuki Batas Jalan	1	1	100%	Camat dan Kasi Trantib
2	Penumpukkan Sampah di TPS By Pass Binuang Hingga ke Badan Jalan	1	1	100%	Camat dan Kasi Trantib
3	Acara Wahana Bermain dan Pasar Malam yang berlokasi di Kelurahan Binuang bertepatan dengan Jadwal Ulangan Sekolah	1	1	100%	Camat dan Kasi Trantib
4	Terhambatnya pengangkutan sampah di TPS Balipat Binuang karena rusaknya peralatan sekop sampah	1	1	100%	Camat dan Kasi Trantib
JUMLAH		4	4	100%	

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bangunan di pinggir Jalan A Yani Desa Tungkap Kecamatan Binuang Memasuki Batas Jalan

Pengaduan ini berasal dari warga Desa Tungkap Kecamatan Binuang pada tanggal 11 April 2023 bahwa ada 1 (satu) bangunan di pinggir Jalan A Yani Desa Tungkap memasuki batas jalan. Kecamatan Binuang menindaklanjuti aduan ini dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa Tungkap dan diperoleh informasi bahwa bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemilik bangunan tidak kooperatif. Untuk itu Kecamatan Binuang berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tapin.

Pada 17 April 2024 pemilik bangunan diberikan Surat Peringatan Pertama oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tapin. Karena pemilik bangunan masih tidak kooperatif, pada 27 April 2024 diberikan lagi Surat Peringatan Kedua. Akhirnya pemilik bangunan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku terkait pendirian bangunan.

2. Penumpukkan Sampah di TPS By Pass Binuang Hingga ke Badan Jalan

Aduan ini berasal dari warga Kelurahan Binuang pada tanggal 10 Mei 2023 bahwa penumpukkan sampah di TPS By Pass Binuang hingga ke badan jalan. Hal ini mengakibatkan bau dan mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kecamatan Binuang menindaklanjuti aduan ini dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dan Pihak Swasta (Perusahaan) mengenai Unit Pengangkutan sampah.

Pada 11 Mei 2023 tumpukan Sampah di TPS By Pass Binuang dan Sirkuit Balipat Binuang sudah diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tapin dengan penambahan petugas dan unit dum truck, dan bantuan dari pihak swasta (perusahaan) berupa unit *Backhoe Loader/ Loader+Exavator*.



1. Penumpukkan sampah di badan jalan



2. Pengangkutan sampah oleh DLH dan Perusahaan



3. TPS dan Jalanan sudah bersih dari tumpukkan sampah

Gambar 3.6 Tindak Lanjut atas Aduan terkait Penumpukkan Sampah

4. Acara Wahana Bermain dan Pasar Malam yang berlokasi di Kelurahan Binuang bertepatan dengan Jadwal Ulangan Sekolah

Aduan ini berasal dari warga Kelurahan Binuang pada tanggal 29 Mei 2023 bahwa acara Wahana Bermain dan Pasar Malam yang berlokasi di Kelurahan Binuang bertepatan dengan Jadwal Ulangan Sekolah. Hal ini meresahkan para orang tua siswa.

Sebagai tindak lanjut atas aduan ini, Kecamatan Binuang berkoordinasi dengan Pengelola/Ketua Penyelenggara Wahana Bermain dan Pasar Malam tersebut. Selanjutnya dibuatlah Surat Rekomendasi Camat terkait Pengaturan Jadwal Buka Wahana Bermain dan Pasar Malam. Hasilnya, pihak pengelola bersedia menaati jadwal buka wahana bermain dan pasar malam sehingga tidak bertepatan dengan jadwal ulangan sekolah.



Gambar 3.7 Wahana Bermain dan Pasar Malam tidak beroperasi di Jadwal Ulangan Sekolah

4. Terhambatnya Pengangkutan Sampah di TPS Balipat Binuang Karena Rusaknya Peralatan Sekop Sampah

Aduan ini disampaikan oleh petugas kebersihan TPS Balipat Binuang pada tanggal 7 November 2023, bahwa pengangkutan

sampah di TPS Balipat Binuang terhambat karena rusaknya peralatan sekop sampah. Menindaklanjuti aduan ini, Kecamatan Binuang membelikan peralatan sekop sampah yang baru dan diserahkan langsung kepada para petugas kebersihan TPS Balipat Binuang untuk kelancaran proses pengangkutan sampah.

Berdasarkan hasil analisis diatas Pada tahun 2023 ada 4 (empat) pengaduan masyarakat dan semuanya sudah di selesaikan, Rumus menghitung indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan adalah :

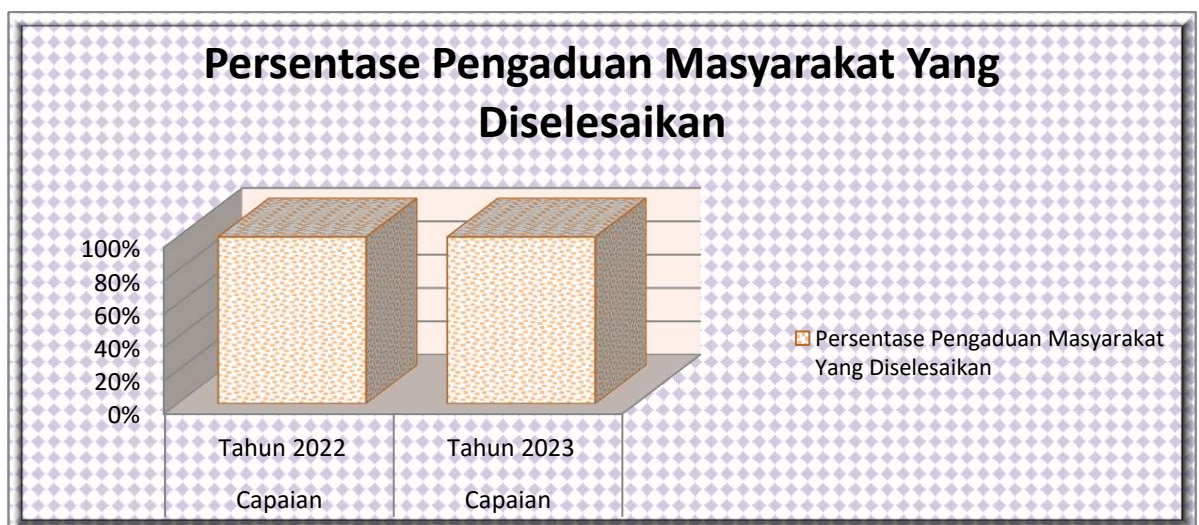
$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk}} \times 100 \%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.6
Perbandingan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Pencapaian sasaran yang ketiga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Binuang melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Capaian atas Sasaran Strategis 3
Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100 %	100 %	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik (Kasi Pemerintahan)
Rata-Rata Capaian IKU					100 %		

Penjelasan capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan

Capaian Sasaran Indikator kinerja Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan, dengan target 100% mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Kecamatan Binuang terdiri dari 8 (delapan) desa. Menurut data hasil monitoring dan evaluasi dokumen pelaporan di 8 (delapan) desa tersebut pada tahun 2023 yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, memperlihatkan bahwa masing-masing desa di Kecamatan Binuang sudah melaksanakan pengelolaan Keuangan dan aset desa dan juga Tata Administrasi Kependudukan Desanya dengan baik. Hal ini patut dipertahankan serta dapat lebih ditingkatkan lagi pada tahun selanjutnya, dengan cara meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur desa melalui kegiatan pendampingan desa, diadakannya pelatihan-pelatihan pengelolaan administrasi bagi aparatur desa, pelaksanaan study banding, dan lain-lain.

Tabel 3.12
Data Desa Dengan Pengelolaan Keuangan
Desa yang sesuai ketentuan

No	Kriteria	Desa							
		Tungkap	Gunung Batu	A Yani Pura	Pualam Sari	Padang Sari	Mekar Sari	Pulau Pinang	Pulau Pinang Utara
1	Adanya Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Pelaksanaan APBDesa	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Penatusahaan Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 8 (delapan) desa se Kecamatan Binuang, keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen Pengelolaan Keuangan Desa. Tiap desa dapat memenuhi dan/atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan ketentuan, Siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa, sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam APBDesa. Rumus menghitung indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Se-Kecamatan Binuang}} \times 100 \%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.7
Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



- 2) Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan Capaian Sasaran Indikator kinerja Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan, dengan target 100% Kecamatan Binuang mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Tabel 3.13
Data Desa Dengan Pengelolaan Aset
Desa yang sesuai ketentuan

No	Kriteria	Desa							
		Tungkap	Gunung Batu	A Yani Pura	Pualam Sari	Padang Sari	Mekar Sari	Pulau Pinang	Pulau Pinang Utara
1	Adanya Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Penggunaan	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Adanya Pemanfaatan	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Adanya Pengamanan	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Adanya Pemeliharaan	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Adanya Penghapusan	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Adanya Pemindahtangan	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Adanya Penatausahaan	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Adanya Pelaporan	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Adanya Penilaian	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Adanya Pembinaan	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Adanya Pengawasan	√	√	√	√	√	√	√	√
14	Adanya Pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 8 (delapan) desa se-Kecamatan Binuang, keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen Pengelolaan Aset Desa. Kecamatan Binuang melalui data dan informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan bahwa pengelolaan aset desa dikelola dengan baik melalui hasil monitoring dan evaluasi aset desa di masing-masing desa Kecamatan Binuang, sehingga pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat tercapai.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat.

Rumus menghitung indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Se-Kecamatan Binuang}} \times 100 \%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.8
Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



3) Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik

Capaian Sasaran Indikator kinerja Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik, dengan target 100% mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

Tabel 3.14

Data Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik

No	Kriteria	Desa							
		Tungkap	Gunung Batu	A Yani Pura	Pualam Sari	Padang Sari	Mekar Sari	Pulau Pinang	Pulau Pinang Utara
1	Adanya Buku Induk Penduduk (BIP) Desa	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Laporan Kependudukan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Laporan Bulanan Kependudukan Desa yang di serahkan ke Kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 8 (delapan) desa se Kecamatan Binuang, keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen administrasi Kependudukan desa. Tiap desa dapat memenuhi dan/atau melaksanakan administrasi Kependudukan desa dengan baik sesuai dengan ketentuan. Rumus menghitung indikator Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik}}{\text{Jumlah Desa Se-Kecamatan Binuang}} \times 100 \%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Tahun 2023

dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.9
Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Desa Yang Baik Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran yang keempat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Binuang melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.16
Capaian atas Sasaran Strategis 4 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score	72,65 Score	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)
Rata-Rata Capaian IKU					99,77%		

Capaian indikator kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Binuang untuk Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022 yang dilakukan penilaian di Tahun 2023 dengan realisasi score yang diperoleh sebesar 72,65 score dari nilai SAKIP yang ditargetkan sebesar 72,82 score. Artinya capaian kinerja atas nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Binuang yang dinilai pada Tahun 2023 sebesar 99,77%. Target nilai SAKIP 72,82 belum tercapai, namun capaian 99,77% termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Adapun komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Binuang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.17
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Binuang

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Target	Nilai	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	24,58	22,60	91,94%
2	Pengukuran Kinerja	30	19,08	22,50	117,92%
3	Pelaporan Kinerja	15	10,62	10,05	94,63%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,54	15,50	83,60%
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,82	72,65	99,77%
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB	

Berdasarkan tabel tersebut Kecamatan Binuang mendapat nilai untuk perencanaan kinerja sebesar 22,60 atau 91,94% dari target 24,58. Nilai Pengukuran Kinerja ialah 22,50 atau 117,92% dari target 19,08. Adapun nilai Pelaporan Kinerja 10,05 atau 94,63% dari target 10,62, sedangkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ialah 15,50 atau 83,60% dari target 18,54. Pengukuran Kinerja menjadi komponen dengan capaian tertinggi, sedangkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan capaian terendah dibandingkan komponen lainnya. Oleh karena itu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan.

Untuk meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Kecamatan Binuang terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka penerapan dan penguatan SAKIP Perangkat Daerah. Kecamatan Binuang juga mendapatkan rekomendasi/catatan atas kualitas implemementasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Tapin guna peningkatan nilai SAKIP. Adapun rekomendasi serta tindak lanjut dari Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pengukuran Kinerja - Pengukuran Capaian Kinerja Belum memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecamatan Binuang telah melaksanakan pengukuran Capaian Kinerja dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Pengukuran Kinerjanya melalui https://esakip.tapinkab.go.id/ ➤ Mulai Tahun 2024 Kecamatan Binuang telah memanfaatkan Aplikasi <i>Google Drive</i> sebagai media pelaporan capaian kinerja. Setiap seksi dan subbagian mengupload data dukung capaian kinerja ke link google drive: https://tinyurl.com/MONEVKINERJABINUANG2024 setiap triwulannya untuk memudahkan pengukuran capaian kinerja. ➤ Kecamatan Binuang juga menyiapkan aplikasi monev internal untuk pengukuran capaian kinerja (<i>SIMONIKA BINUANG : Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binuang</i>). Aplikasi ini masih dalam tahap pembuatan, dan ditargetkan sudah dapat digunakan pada Triwulan III Tahun 2024
2	Pelaporan Kinerja - Terdapat Dokumen Laporan Kinerja namun belum terdapat menginfokan perbandingan	Kecamatan Binuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini telah menginfokan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level Nasional (Benchmark Kinerja)

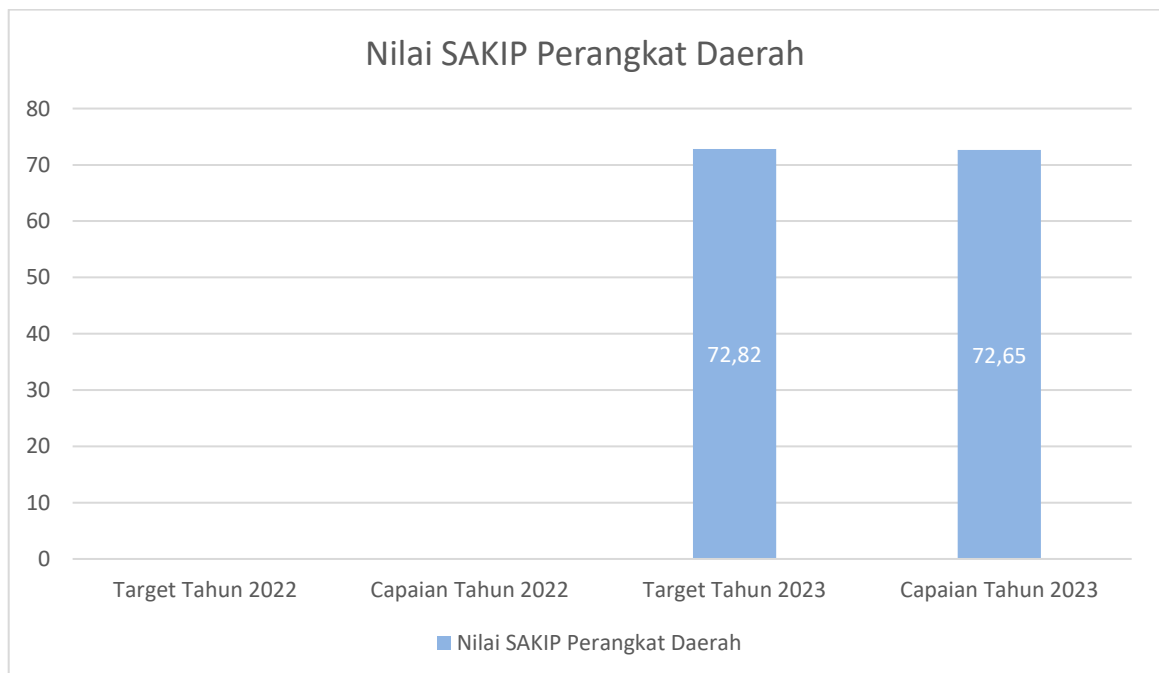
	Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	
	- Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan di hadapi tahun berikutnya	Kecamatan Binuang telah menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya. Hal ini terlihat dalam rangka penyusunan pohon kinerja dan <i>cascading</i> kinerja menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
	- Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Informasi dalam laporan kinerja menjadi pendorong motivasi setiap pegawai Kecamatan Binuang untuk terus meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, serta terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Perubahan budaya kinerja ini dapat dilihat dari keberhasilan Kecamatan Binuang meraih penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
3	Evaluasi Internal - Belum terdapat pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal pada unit kerja yang menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecamatan Binuang telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Pengukuran Kinerja nya melalui https://esakip.tapinkab.go.id/ ➤ Mulai Tahun 2024 Kecamatan Binuang telah memanfaatkan Aplikasi Google Drive sebagai media pelaporan capaian kinerja. Setiap seksi dan subbagian mengupload data dukung capaian kinerja ke link google drive: https://tinyurl.com/MONEVKINERJABINUANG2024 setiap triwulannya untuk memudahkan monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja. ➤ Kecamatan Binuang juga menyiapkan aplikasi

		<p>untuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal (<i>SIMONIKA BINUANG : Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binuang</i>). Aplikasi ini masih dalam tahap pembuatan, dan ditargetkan sudah dapat digunakan pada Triwulan III Tahun 2024.</p>
-	<p>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum di manfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Binuang. Hal ini terlihat dalam penyusunan pohon kinerja dan <i>cascading</i> kinerja menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja juga ditindaklanjuti seluruhnya oleh Kecamatan Binuang mulai dari penggunaan teknologi informasi hingga penyajian informasi perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level Nasional (Benchmark Kinerja).</p>
-	<p>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum di manfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja</p>	<p>Kecamatan Binuang telah memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi esakip https://esakip.tapinkab.go.id/ dan <i>google drive</i> untuk pengukuran dan monev capaian kinerja. Dan kedepannya Kecamatan Binuang akan memiliki aplikasi internal untuk pengukuran dan monev kinerja (<i>SIMONIKA BINUANG: Sistem Montoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binuang</i>). Kecamatan Binuang juga menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik diantaranya SIMPANAN BINUANG (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Binuang), WADUL (WA atau DM untuk Lapo), SUPERMAN (Sudut Permainan dan Edukasi Minat Anak), SUNAMI (Sudut Nambah Ilmu), dan SIJUMANJI (Aksi Jumat ASN dan Masyarakat Bikin Janji).</p>

	<p>- Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal</p>	<p>Kecamatan Binuang terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut ditindaklanjuti seluruhnya oleh Kecamatan Binuang. Hasilnya, kinerja Kecamatan Binuang terus membaik dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 Kecamatan Binuang berhasil menjadi Unit Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.</p>
--	--	--

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra disajikan dalam diagram berikut :

Diagram 3.10
Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran yang kelima menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Binuang melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja dengan sasaran strategis terakhir yaitu meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah dengan capaian target sebesar 100% dari nilai realisasi sebesar 18,9 poin dari 18,9 poin yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 3.19
Capaian atas Sasaran Strategis 5 Kecamatan Binuang
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,9 Poin	18,9 Poin	100%	91 % ≤ 100% Sangat Tinggi	Nilai IP-ASN (Sekcam)
Rata-Rata Capaian IKU					100%		

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Terdapat 4 dimensi dalam pengukuran IP ASN, yakni; 1) Dimensi Kualifikasi, 2) Dimensi Kompetensi, 3) Dimensi Kinerja, 4) Dimensi Disiplin. Adapun kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN dibagi menjadi 5 (lima) kategori sebagaimana dalam tabel berikut: 91-100 (sangat tinggi), 81-90 (tinggi), 71-80 (sedang), 61-70 (rendah), kurang dari 60 (sangat rendah).

Tabel 3.20**Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN**

No	Nilai	Indeks Profesionalisme
1	91-100	Sangat Tinggi
2	81-90	Tinggi
3	71-80	Sedang
4	61-70	Rendah
5	Kurang dari 60	Sangat Rendah

Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Kecamatan Binuang telah mencapai target 100% yakni 18,9 poin. Namun nilai ini masih dalam kategori sangat rendah. Hal ini karena pada Tahun 2023 masih banyak ASN yang belum mengupload bukti dukung IP ASN seperti ijazah dan sertifikat diklat/bimtek ke Aplikasi Padaringan Kabupaten Tapin. Untuk itu Kecamatan Binuang akan mendorong keaktifan para ASN untuk mengupload semua bukti dukung IP ASN ke Aplikasi Padaringan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi IP ASN secara berkala. Tentunya untuk meningkatkan IP ASN Kecamatan Binuang juga perlu didukung peningkatan dimensi pengukuran yakni:

1) Kualifikasi

Pada tahun 2022 ada 3 (tiga) ASN Kecamatan Binuang dengan kualifikasi Pendidikan Diploma III yang melanjutkan pendidikannya ke Strata 1 dan diperkirakan akan lulus di Tahun 2024. Kualifikasi Pendidikan ASN Kecamatan Binuang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21**Kualifikasi Pendidikan ASN Kecamatan Binuang Tahun 2023**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah ASN
1	Strata III	0
2	Strata II	8
3	Strata I	8
4	Diploma III	6
5	Diploma II	1
6	SMA	2
TOTAL		25

2) Kompetensi

Kecamatan Binuang memberikan kesempatan yang luas bagi para ASNnya untuk meningkatkan kompetensi, mulai dari mengikuti Diklat, bimbingan teknis, hingga workshop. Pada Tahun 2023, Camat Binuang H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners,MM lulus dengan predikat “SANGAT MEMUASKAN” pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Kinerja

Penilaian Kinerja dilakukan melalui aplikasi e-kinerja pada <https://kinerja.bkn.go.id/>. Seluruh ASN Kecamatan Binuang telah mendapatkan nilai kinerja minimal baik.

4) Disiplin

Tidak ada ASN Kecamatan Binuang yang pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Nilai IP-ASN Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.11
Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir

Berikut ini adalah perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Dan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja						
		2021		2022		2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RENSTRA TAHUN 2018-2023								
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87,00 Poin	87,50 Poin	88,00 Poin	88,79 Poin	89,00 Poin	89,03 Poin	100,03%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja						
		2021		2022		2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	72,82 Score	72,65 Score	99,77%
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	-	18,9 Poin	18,9 Poin	100%
RATA RATA CAPAIAN IKU								99,98%

Berdasarkan tabel diatas, semua Indikator Kinerja Utama tahun 2023 sudah mencapai target yang di tetapkan dan masuk ke dalam kategori “sangat tinggi”. Pada tahun 2023 ada penambahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dimana pada tahun 2022 hanya memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu; 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan, 2) Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan, dan 3) Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Sedangkan, pada tahun 2023 memiliki 5 (lima) sasaran strategis, yaitu : 1) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan, 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, 3) Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan 5) Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Kecamatan Binuang pada tahun 2023 ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, karena dari tabel di atas seluruh Indikator Kinerja Utama telah terealisasi dengan capaian diatas 91%. Adapun rata-rata realisasi capaian Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Binuang Tahun 2023 ialah 99,98% dan masuk kategori “Sangat Tinggi”.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Berikut ini perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang disajikan pada tabel 3.17 :

Tabel 3.23
Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dan Perbandingan Dengan Tahun Akhir Renstra (2018-2023)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	89,03 poin	89,00 poin	100,03 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100%	100 %	100%
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%
		Persentase desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100 %	100 %	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score	72,65 Score	99,77%
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,9 Poin	18,9 Poin	100%
RATA-RATA					99,98%

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan tabel diatas mengenai Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (Renstra). Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Kantor Kecamatan Binuang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari hasil realisasi dengan capaian rata-rata 99,98%. Capaian kinerja ini masuk kategorisasi Sangat Baik.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis Kecamatan Binuang Tahun 2023 yang Indikator Kinerja Utamanya dapat dibandingkan realisasinya dengan standar nasional yakni:

- 1) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan dan Indeks Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan Kecamatan Binuang diukur dengan indikator nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada Tahun 2023 Kecamatan Binuang meraih nilai IKM 89,09 dengan kategori “Sangat Baik”.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Binuang juga diukur berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Tahun 2023. PEKPPP akan menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai nilai atas kualitas pelayanan publik secara nasional. Berdasarkan hasil PEKPPP Tahun 2023 diperoleh nilai IPP nasional yakni 3,88 yang termasuk kategori “Baik”.

Berdasarkan hasil PEKPPP tersebut, Kecamatan Binuang meraih penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik kategori “Sangat Baik” Tahun 2023 dari Kementerian PANRB. Dengan

demikian, Kecamatan Binuang telah melampaui standar nasional dalam hal kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Kemenpan-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, nilai standar nasional tingkat Lembaga atau kementerian minimal "**Baik**". Selain itu disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023 diperoleh nilai rata-rata AKIP secara nasional sebesar 63,36. Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023 diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17.

Kecamatan Binuang memperoleh realisasi Nilai SAKIP 72,65 dengan predikat BB atau "**Sangat Baik**". Dengan demikian realisasi kinerja Kecamatan Binuang dalam hal realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah melampaui standar nasional.

3) Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah, dengan Indikator: Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Realisasi Indeks Profesionalisme ASN Kecamatan Binuang Tahun 2023 ialah 18,9 dari target 18,9. Meskipun capaian realisasi 100% namun IP ASN Kecamatan Binuang masih dalam kategori "Sangat Rendah".

Berdasarkan Data dari Badan Kepegawaian Negara yang tertuang dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022, hasil pengukuran/nilai IP ASN secara nasional tahun 2021 ialah sebesar 44,60. Dengan demikian, nilai IP ASN Kecamatan Binuang Tahun 2023 yakni 18,9 masih jauh dibawah standar nasional.

Untuk itu Kecamatan Binuang harus terus mengupayakan peningkatan IP ASN pada semua dimensi pengukuran IP ASN yakni:

1) Dimensi Kualifikasi, 2) Dimensi Kompetensi, 3) Dimensi Kinerja, dan 4) Dimensi Disiplin. Disamping itu monitoring dan evaluasi capaian nilai IP ASN juga perlu dilaksanakan secara berkala oleh Kecamatan Binuang.

Perbandingan dengan standar nasional ini menjadi motivasi bagi Kecamatan Binuang untuk giat mengupayakan peningkatan IP ASN, dan dalam menentukan target capaian nilai IP ASN agar berpatokan pada standar nasional. Namun capaian nilai IP ASN bukanlah hal yang *instant*, tentunya memerlukan upaya dan waktu. Oleh karena itu Kecamatan Binuang meningkatkan target capaian nilai IP ASN secara bertahap, yakni target nilai 30 di Tahun 2024 dan 50 di Tahun 2025.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023
dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kecamatan Binuang	Realisasi Kecamatan Binuang	Standar Nasional	Ket
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan dan Indeks Pelayanan Publik	89,00 Sangat Baik	89,03 Sangat Baik	Baik	Melampaui standar nasional
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 (Sangat Baik/BB)	72,65 (Sangat Baik/BB)	Baik/B	Melampaui standar nasional
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,9	18,9	44,60	Dibawah standar nasional

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan

perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Binuang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Binuang pada tahun 2023 adalah sebesar 99,98%. Dengan demikian maka dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Binuang untuk Tahun 2023 dikategorikan sangat tinggi.

Sedangkan untuk indikator program Kecamatan Binuang dipengaruhi yang pertama oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Binuang ditargetkan pada tahun 2023 adalah 89,00 Poin dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 89,03 Poin. Dengan demikian, maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Binuang untuk Tahun 2023 dikategorikan berhasil.

Untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar 100% diperoleh dari penghitungan rata-rata perolehan dari (3) tiga indikator yaitu persentase layanan Masyarakat dengan Indeks minimal B, persentase rekomendasi yang diselesaikan, dan persentase pengaduan Masyarakat yang diselesaikan adalah sebesar 100% didapatkan hasil capaian sebesar 100%.

Kemudian sasaran strategis ketiga Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2023 diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP Perangkat daerah dapat teralisasi sebesar 72,82 score dari target yang ditetapkan sebesar 72,65. Sehingga didapatkan hasil capaian kinerja sebesar 99,77%.

Sasaran strategis terakhir, yaitu Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah memiliki hasil capaian sebesar 100% dari nilai

realisasi 18,9 poin dengan target tahun 2023 sebesar 18,9 poin yang ditargetkan.

Dengan demikian, dalam pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Renstra Kecamatan Binuang untuk Tahun 2023 dapat memenuhi target. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen di lingkungan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien
- b. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian.
- c. Meningkatkan kemampuan SDM, agar kemampuannya aparatur di perencanaan lebih handal.
- d. Melaksanakan/mengikutsertakan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pembimbingan ataupun pendampingan agar kemampuan dan wawasan pengetahuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap anggaran berbasis kinerja meningkat.
- e. Menumbuhkan kesadaran pada setiap birokrasi akan pentingnya penjangkaran dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk menyusun rencana kerja agar hasil maksimal diperoleh pada setiap kegiatan.

Namun dalam pelaksanaan Pencapaian Kinerja Program Kecamatan Binuang tahun 2023 walaupun berhasil mencapai target yang ditetapkan ada beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi serta solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

A. Masalah Internal

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi dan kualitas sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan cara yaitu:

- Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti izin belajar, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Masih kurangnya jumlah SDM ASN Kecamatan Binuang sehingga beban tugas seringkali *overload*. Diatasi dengan merekrut Pegawai Tidak Tetap yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai serta menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Binuang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yaitu BKPSDM Kabupaten Tapin.
- c. Jaringan internet yang tidak stabil karena belum tersedianya jaringan internet *indihome*. Permasalahan ini diatasi dengan penggunaan modem orbit untuk jaringan internet yang lebih stabil.

B. Masalah Eksternal.

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan lintas sektor.

Berikut disajikan tabel Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023.

Tabel 3.25
Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	89,00 poin	89,03 poin	100,03 %	Tercapai, dengan menggunakan perhitungan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Binuang dengan ditargetkan pada tahun 2023 adalah 89,00 poin dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 89,03 poin.	Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dari berbagai kriteria dalam kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan, meliputi : Persyaratan, Prosedur, Ketepatan Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi, Perilaku, Kualitas Sarpras, dan Penanganan Pengaduan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %	100%	100%	Tercapai, dengan hasil capaian Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B sebesar 100% dari yang ditargetkan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan Agar Dapat Mengetahui Data dan Informasi Hasil dari Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori indeks Kepuasan Masyarakat Minimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik)
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan hasil Persentase rekomendasi yang diselesaikan sebesar 100% dari target yang dijanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 100%	Meningkatkan penyelesaian surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari berbagai Kepala Seksi yang ada di Kecamatan sesuai dengan SOP

		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan capaian hasil Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023 sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan	Meningkatkan penyelesaian pengaduan Masyarakat oleh Kecamatan baik melalui mediasi ataupun cara-cara lainnya.
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan persentase capaian atas pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan sebesar 100%	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku melalui Fasilitasi kegiatan bagi aparatur desa monitoring dan evaluasi keuangan desa.
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan persentase capaian atas pengelolaan aset desa yang sesuai ketentuan sebesar 100%	Meningkatkan Pengelolaan aset Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku melalui Fasilitasi kegiatan bagi aparatur desa monitoring dan evaluasi keuangan desa.
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan.	Meningkatkan verifikasi Data Kependudukan yang diterima dari Desa/Kelurahan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score	72,65 Score	99,77 %	Belum tercapai, dengan Nilai SAKIP Kecamatan Binuang yang diperoleh 72,82 score dari target 72,65 score sehingga capaian indikator kinerja sebesar 99,77%	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,9 Poin	18,9 Poin	100 %	Tercapai, dengan capaian Indeks Profesionalisme (IP-ASN) Kecamatan Binuang sebesar 100% dengan realisasi sebesar 18,9 poin dari 18,9 poin yang ditargetkan	Meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) melalui berbagai aspek yaitu perhitungan bobot baik pada Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja serta Dimensi Disiplin berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN.
---	---	--	-----------	-----------	-------	--	---

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Binuang untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Binuang.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Data Manusia (SDM) pada Kantor Camat Binuang sudah melaksanakan kinerja dengan optimal pada bidang masing-masing. Para pegawai pun giat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi diri dengan mengikuti izin belajar, Diklat Struktural maupun teknis, bimbingan teknis, sosialisasi dan *workshop*. Namun jumlah aparatur masih kurang dari yang seharusnya sehingga banyak ASN yang beban kerjanya *overload*. Solusi untuk antisipasinya, Kecamatan Binuang merekrut Pegawai Tidak Tetap yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni, selanjutnya melakukan Koordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan kebutuhan Pegawai.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Binuang sudah sangat memadai mulai dari ketersediaan PC, Laptop, dan Printer yang canggih, ruang kerja dan ruang pelayanan yang dilengkapi Air Conditioner, ruang tunggu pelayanan dengan TV layar besar dan Sofa yang nyaman, serta berbagai sarana prasarana untuk kaum rentan (kursi roda, pojok bermain anak, ruang laktasi, tangga ramp, toilet difabel, dan *guiding block*). Sarana dan prasarana tersebut digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Binuang.

Namun ada permasalahan terkait jaringan internet di Kantor Kecamatan Binuang yang kurang stabil berhubung belum tersedianya jaringan internet *indihome*. Solusinya Kecamatan Binuang telah menggunakan modem orbit untuk jaringan internet yang lebih stabil.

c. Anggaran

Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Binuang pada tahun anggaran 2023 Anggaran Belanja Kecamatan Binuang sebesar Rp. 8.480.605.477 anggaran ini dipergunakan untuk menjalankan 5 sasaran Strategis dan 9 Indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan pada awal tahun 2023 dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah.

Kecamatan Binuang memiliki 6 program Kegiatan yang dilaksanakan. Dari total anggaran Rp. 8.480.605.477, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 7.969.025.016 atau sebesar 93,97%. Meskipun anggaran tidak terserap seluruhnya, Kecamatan Binuang tetap dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 99,98%. Dengan demikian Kecamatan Binuang telah efisien dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga maka pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Untuk melaksanakan program dengan menggunakan sumber daya anggaran yang ada, maka pelaksanaannya didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin berjumlah 25 orang. Dari kekuatan sumber daya manusia

tersebut tingkat pencapaian sasaran strategis dengan seluruh indikator yang telah diperjanjikan sebesar 99,98%. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Binuang tahun 2023 dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\% \\ &= \frac{(8.480.605.477 \times 99,98) - 7.969.025.016}{8.480.605.477 \times 99,98} \times 100\% \\ &= 99,06\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran Kecamatan Binuang ialah 99,06% dan termasuk kategori kategori “Sangat Tinggi” sebab berada di interval $91\% \leq 100\%$. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Binuang tahun 2023 tersebut dapat di lihat pada tabel berikut 3.26.

Tabel 3.26

Efisiensi Sumber Daya Kecamatan Binuang Tahun 2023

Capaian Kinerja Sasaran (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	3	4
99,98 %	8.480.605.477	7.969.025.016	99,06%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja organisasi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023, Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Pernyataan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	100,03%	Menunjang
2	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100%	Menunjang
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100%	Menunjang
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan	100%	Menunjang
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan	100%	Menunjang

			Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%	Menunjang
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,77%	Menunjang
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	100%	Menunjang

Penetapan indikator kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat berhasil. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah terealisasi pada SKPD Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sepanjang tahun 2023 yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2023 ada 6 program kegiatan dalam mendukung kinerja kecamatan Binuang meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Binuang diukur menggunakan 5 Tujuan/Sasaran Kinerja dengan di tunjang 9 indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan, Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B, persentase rekomendasi yang diselesaikan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan , Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan, Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan persentase desa dengan administarasi kependudukan yang baik, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah.

1. Analisis keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan di tunjang oleh:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

indikator Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan pendukungnya, Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan ini dengan menggunakan perhitungan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Binuang dengan ditargetkan pada tahun 2023 adalah 89,00 poin dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 89,03 poin, Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dari berbagai kriteria dalam kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan, meliputi : Persyaratan, Prosedur, Ketepatan Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi, Perilaku, Kualitas Sarpras, dan Penanganan Pengaduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari pemangku

kepentingan untuk mengutamakan pelayanan publik di lingkungan SKPD Kecamatan Binuang.

2. Analisis keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan 3 indikator kinerja yaitu Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B, persentase rekomendasi yang diselesaikan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan ditunjang oleh:

a. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,**

Indikator Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui 2 Kegiatan dan 4 Sub kegiatan Pendukungnya dengan hasil capaian indikator kinerja Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B dengan capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan dengan melalui Data dan Informasi Hasil dari Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori indeks Kepuasan Masyarakat Minimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik). Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan ini disebabkan tersedianya Fasilitas kegiatan pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengutamakan pelayanan publik di lingkungan SKPD Kecamatan Binuang.

b. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,**

Indikator Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan Pendukungnya dengan hasil Persentase rekomendasi yang diselesaikan dengan capaian sebesar 100% dari target yang dijanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% Meningkatkan penyelesaian surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari berbagai Kepala Seksi yang ada di Kecamatan sesuai dengan SOP Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan ini karena tersedianya anggaran untuk mendukung 2 kegiatan tersebut selain itu kegiatan ini di dukung dengan

koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan agar dapat tercapainya target kinerja di masing masing bidang.

- c. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, Indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan Pendukungnya dengan capaian hasil Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023 sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan, Meningkatkan penyelesaian pengaduan Masyarakat oleh Kecamatan baik melalui mediasi ataupun cara-cara lainnya Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan ini karena tersedianya anggaran untuk mendukung 2 kegiatan tersebut selain itu kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan agar dapat tercapainya target kinerja di masing masing bidang.

3. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dengan 3 indikator kinerja yaitu Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan, Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan persentase desa dengan administarasi kependudukan yang baik ditunjang oleh:

- a. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, Indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan hasil capaian indikator kinerja persentase capaian atas pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan sebesar 100% dengan cara meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku melalui fasilitasi kegiatan kepada aparatur desa di Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan desa, Persentase capaian atas pengelolaan aset desa yang sesuai ketentuan sebesar 100% dengan cara meningkatkan Pengelolaan

Aset Desa dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku melalui fasilitasi kegiatan kepada aparatur desa di Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi aset desa, Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan dengan meningkatkan verifikasi Data Kependudukan yang diterima dari Desa/Kelurahan memberikan arahan, bimbingan serta fasilitas kepada aparatur desa di wilayah Kecamatan selain itu kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan agar dapat tercapainya target kinerja dan terwujudnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan berlaku di wilayah kecamatan.

4. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditunjang oleh:

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, Indikator Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di tunjang melalui 2 Kegiatan yaitu Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan hasil capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Binuang yang diperoleh 72,65 score dari target 72,82 score sehingga capaian indikator kinerja sebesar 99,77%. Meskipun belum berhasil mencapai nilai SAKIP 72,82, tingkat capaian nilai SAKIP 72,65 atau 99,77% dari target termasuk kategori capaian “Sangat Tinggi”.

Adapun pencapaian pada kegiatan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Selain itu

kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan agar dapat tercapainya target kinerja di masing masing bidang. Kedepannya, untuk meningkatkan nilai SAKIP agar dapat mencapai target yang ditetapkan, Kecamatan Binuang telah menindaklanjuti semua rekomendasi/masukan yang diberikan Inspektorat Kabupaten Tapin dalam LHE SAKIP Kecamatan Binuang Tahun 2022.

5. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah ditunjang oleh:
 - a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, Indikator Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah di tunjang melalui 4 Kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan hasil capaian indikator kinerja Indeks Profesionalisme (IP-ASN) Kecamatan Binuang sebesar 100% dengan realisasi sebesar 18,9 poin dari 18,9 poin yang ditargetkan Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan meningkatnya Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) melalui berbagai aspek yaitu perhitungan bobot baik pada Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja serta Dimensi Disiplin berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN selain itu kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar seluruh ASN di lingkup kantor Kecamatan Binuang agar dapat tercapainya target kinerja indeks Profesionalisme ASN di SKPD Kecamatan Binuang. Untuk lebih menunjang keberhasilan kinerja Kecamatan Binuang mengambil beberapa langkah, diantaranya:

1. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.
2. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian
3. Meningkatkan kemampuan SDM , agar kemampuannya aparatur di perencanaan lebih handal.
4. Melaksanakan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pembimbingan ataupun pendampingan agar kemampuan dan wawasan pengetahuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap anggaran berbasis kinerja
5. Menumbuhkan kesadaran pada setiap birokrasi akan pentingnya penjangkauan dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk menyusun rencana kerja agar hasil maksimal diperoleh pada setiap kegiatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2023 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 8.480.605.477 dengan Realisasi sebesar Rp. 7.969.025.016 dan Persentase Realisasi Anggaran mencapai 93,97 %. Pagu dan realisasi dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.28

**Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Binuang
Kabupaten Tapin Tahun 2023**

No	Uraian	Tahun 2023		
		1 Januari s.d. 31 Desember 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai/ Non Kegiatan	3.426.142.329	3.214.427.369	93,82
2	Belanja Barang dan Jasa	3.518.932.708	3.263.251.205	92,73
3	Belanja Modal	1.535.530.440	1.491.346.442	97,12
	JUMLAH	8.480.605.477	7.969.025.016	93,97

Secara keseluruhan, rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Binuang dalam tahun 2023 ialah 93,97%. Capaian realisasi ini termasuk kategorisasi **SANGAT TINGGI**. Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Kecamatan Binuang Tahun 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.916.636.819	5.517.603.510	93,26
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.008.000	6.008.000	100
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.008.000	6.008.000	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.430.940.729	3.219.225.569	93,83
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.142.329	3.214.427.369	93,82
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.399.200	2.399.100	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.399.100	2.399.100	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	944.623.284	926.549.647	98,09
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.532.966	65.203.000	99,50
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.681.243	36.499.680	99,51
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.571.506	87.014.840	95,02
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.809.413	21.709.254	99,54
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	729.028.156	716.122.873	98,23
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	922.241.734	810.277.692	87,86
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	476.013.806	469.420.704	98,61
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	446.227.928	340.856.988	76,39
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.231.456	332.441.450	99,76
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.045.456	6.040.000	99,91
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	50.777.040	50.770.090	99,99

	Air dan Listrik			
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.408.960	275.631.360	99,72
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.591.616	223.101.152	79,82
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	69.655.616	68.851.152	98,85
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.936.000	154.250.000	73,47
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.226.000	36.225.900	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.226.000	36.225.900	100
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.226.000	36.225.900	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.242.219.632	2.138.710.488	95,38
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	216.471.642	216.439.848	99,99
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.417.500	4.417.300	99,99
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	212.054.142	212.022.548	99,99
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.025.747.990	1.922.270.640	94,89
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	700.500.966	695.072.750	99,23
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.325.247.024	1.227.197.890	92,60
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	130.458.434	130.455.320	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	130.458.434	130.455.320	100
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	128.249.684	128.246.670	100
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.208.750	2.208.650	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	117.474.398	117.469.148	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	117.474.398	117.469.148	100
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	117.474.398	117.469.148	100

	Kesatuan Republik Indonesia			
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.590.194	28.560.650	75,98
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.590.194	28.560.650	75,98
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750	2.208.750	100
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.835.000	8.832.050	99,97
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa	2.208.750	2.205.900	99,87
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.208.750	2.208.750	100
5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.128.944	13.105.200	59,22
	JUMLAH	8.480.605.477	7.969.025.016	93,97

Sumber : SIMDA FMIS Keuangan Kab.Tapin Tahun 2023

Anggaran belanja Kecamatan Binuang Tahun 2023 sudah terealisasi 93,97%, namun ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi pembayarannya belum bisa di bayarkan sampai dengan akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana pada rekening kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapin dan menjadi tidak terbayarkan kepada pihak ke-3 di tahun 2023, sehingga realisasi anggaran kegiatan ini menjadi tidak tercapai dan menjadi utang jangka pendek lainnya dalam neraca keuangan Kecamatan Binuang.

Kegiatan yang belum dibayarkan dan menjadi utang jangka pendek lainnya yakni Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Kecamatan Binuang akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu juga tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tapin

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2023. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2023, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin menetapkan 5 (Lima) Sasaran Strategis dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja diatas 100% atau dengan kategori capaian “Sangat Tinggi” sebanyak 1 IKU, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan (100,03%)
- 2) Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja $91 \% \leq 100 \%$ atau dengan kategori capaian “Sangat Tinggi” sebanyak 8 IKU yakni:
 - a. Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B (100%)
 - b. Persentase rekomendasi yang diselesaikan (100%)
 - c. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan (100%)
 - d. Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan (100%)
 - e. Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan (100%)
 - f. Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik (100%)
 - g. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (99,77%)
 - h. Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (100%)

3) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin adalah sebesar 99,98% dan termasuk kategori “Sangat Tinggi”

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Kecamatan Binuang akan terus mengupayakan pencapaian target melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Binuang, Maret 2024

Camat Binuang,



H. HENDERİYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
Penata Tk I / III d
NIP. 19860101 201101 1 015

LAMPIRAN -LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO HARYONO,SE,MM
Jabatan : CAMAT BINUANG

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : BUPATI TAPIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,

EKO HARYONO,SE,MM
NIP. 19781001 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran**

**: KECAMATAN BINUANG
: 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	89
		Persentase Layananan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang baik	100%
		Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100 %

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Kabupaten/Kota	4.664.034.912,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan		
Pelayanan Publik	36.226.000,-	APBD
3. Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.528.806.089, -	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.417.500,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.065.490,-	APBD
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.590.194,-	APBD
Jumlah Anggaran	7.294.180.185,-	



Drs. H.M.ARIFIN ARPAN, MM

Rantau, 06 Februari 2023
CAMAT BINUANG



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
Jabatan : Sekretaris Camat Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Sekcam
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase laporan kinerja yang dibuat tepat waktu	100 %
2	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	100 %
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	100 %
3	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.664.034.912-	APBD
Jumlah Anggaran	4.664.034.912,-	

Camat Binuang



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, 6 Februari 2023
Sekretaris Camat Binuang

H. HENDRIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JURHANA YATI, S.AP
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
Jabatan : Sekretaris Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Pihak Pertama,

JURHANA YATI, S.AP
NIP. 19760212 201001 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.008.000,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.399.200,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.399.200,-	APBD
Jumlah Anggaran	10.806.400,-	

Sekretaris Camat Binuang



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Rantau, 6 Februari 2023
Kasubbag Perencanaan & Keuangan



JURHANA YATI, S.AP
NIP. 19760212 201001 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR CAMAT BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NELLY HARTATI, S.Pd,MM
Jabatan : Kasubbbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
Jabatan : Sekretaris Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Pihak Pertama,

NELLY HARTATI, S.Pd,MM
NIP. 19880824 201503 2 002

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal	Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80%
		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang dibuat	100%
		Persentase File Data Kepegawaian Yang Lengkap	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.141.515,-	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.484.190,-	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.075.291,-	APBD
4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	66.483.776,-	APBD
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.890.292,-	APBD
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.918.800,-	APBD
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.895.180,-	APBD
8. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.360.000,-	APBD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.489.200,-	APBD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.781.840,-	APBD
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	189.266.240,-	APBD

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.506.188,-	APBD
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.936.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	4.653.228.512,-	

Sekretaris Camat Binuang



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Rantau, 6 Februari 2023
Kasubbag Umum & Kepegawaian



NELLY HARTATI, S.Pd,MM
NIP. 19880824 201503 2 002

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESTI SAPTO RINI, SP,MM
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Pihak Pertama,


ESTI SAPTO RINI, SP,MM
NIP. 19721013201406 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**

Unit Kerja : Kasi Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen laporan APBDes	48 Laporan
		Jumlah Rekomendasi Pencairan ADD dan DD	64 Rekomendasi
2	Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.266.000,-	APBD
2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750-	APBD
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.835.000,-	APBD
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.208.750,-	APBD
5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.208.750,-	APBD
6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.128.944,-	APBD
Jumlah Anggaran	73.856.194,-	

Camat Binuang



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, 6 Februari 2023
Kasi Pemerintahan



ESTI SAPTO RINI, SP,MM
NIP. 19721013201406 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. AMINAH S.Pd. MM
Jabatan : Kasi Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Pertama,

Hj. AMINAH S.Pd. MM
NIP. 19800901 200904 2 002

Pihak Kedua,

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013



PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Kasi Perekonomian
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ekonomi Pedesaan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%
		Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	1.914.500,-	APBD
Jumlah Anggaran	1.914..500,-	

Camat Binuang



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, 6 Februari 2023
Kasi Perekonomian

Hj. AMINAH S.Pd. MM
NIP. 19800901 200904 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kasi Kesra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Pertama,

Hj. DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
NIP. 19701009 199303 2 007

Pihak Kedua,

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Kasi Kesejahteraan Sosial
Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100%
		Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	65%
		Persentase keluhan/pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
- Kegiatan Koordinasi Keagamaan	20.358.000,-	APBD
- Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	14.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	34.358.000,-	

Camat Binuang



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, 6 Februari 2023
Kasi Kesra

DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
NIP. 19701009 199303 2 007

**PERJANJIAN KINERJA
KANTOR CAMAT BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA RAHMAN, S.Kep, Ners
Jabatan : Kasi Trantib

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Pihak Pertama,

MAYA RAHMAN, S.Kep, Ners
NIP. 19870812 201001 2 027

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Laporan Bidang Trantib	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	23.065.490,-	APBD
2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.208.750,-	APBD
3. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.208.750,-	APBD
Jumlah Anggaran	27.482.990,-	

Camat Binuang



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, 6 Februari 2023

Kasi Trantib

MAYA RAHMAN, S.Kep, Ners
NIP. 19870812 201001 2 027

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Pertama,

EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
NIP. 19800727 200904 1 005

Pihak Kedua,

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Kasi Pembangunan
Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pembangunan Masyarakat Kecamatan Binuang	Persentase Layanan IMB sesuai ketentuan	100%
		Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di Desa	4.417.500,-	APBD
Jumlah Anggaran	4.417.500,-	

Camat Binuang



EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, 6 Februari 2023
Kasi Pembangunan



EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
NIP. 19800727 200904 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAIDI
Jabatan : Lurah Raya Belanti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camat Binuang

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Pertama,

JAIDI, A.Md, Kes
NIP. 19661015 198812 1 002

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Lurah Raya Belanti
 Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Meningkatkan sarana dan prasarana Kelurahan Raya Belanti dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Raya Belanti	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	354.400.000,-	APBD
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Raya Belanti	289.319.724,-	APBD
"		
Jumlah Anggaran	643.719.724,-	

Rantau, 6 Februari 2023

Lurah Raya Belanti



EKO HARYONO, SE, MM
 NIP. 19781001 201001 1 013

JAIDI, A.Md.Kes
 NIP. 19661015 198812 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUANA
Jabatan : Plt.Lurah Karangany Putih

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Pertama,

DUANA, A.Ma, Pd
NIP.19651211 198608 1 002

Camat Binuang

EKO HARYONO, SE, MM
NIP. 19781001 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Lurah Karangang Putih

Tahun Anggaran : 2022

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Meningkatkan sarana dan prasarana Kelurahan Karangang Putih dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangang Putih	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangang Putih	355.200.000,-	APBD
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangang Putih	280.598.539,-	APBD
Jumlah Anggaran	635.798.539,-	

Rantau, 6 Februari 2023

Camat Binuang



EKO HARYONO, SE, MM

NIP. 19781001 201001 1 013

Plt.Lurah Karangang Putih

DUANA, A.Ma.Pd

NIP.19651211 198608 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. UMIE AMELEA ARTHA, SKM,MM
Jabatan : Lurah Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EKO HARYONO, SE,MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 6 Februari 2023

Camat Binuang

EKO HARYONO, SE,MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Pihak Pertama,

Hj. UMIE AMELEA ARTHA, SKM,MM
NIP. 19710808 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Lurah Binuang
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Pembangunan Meningkatkan sarana dan prasaraana Kelurahan Binuang	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binuang	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	347.200.000,-	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binuang	288.805.000,-	APBD
Jumlah Anggaran	638.005.000,-	

Rantau, 6 Februari 2023

Lurah Binuang



Hj. UMIE AMELEA ARTHA, SKM,MM
NIP. 19710808 199203 2 007



Camat Binuang



EKO HARYONO, SE,MM
NIP. 19781001 201001 1 013

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Binuang Tahun 2023

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM**
Jabatan : Camat Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ARIFIN ARPAN**
Jabatan : Bupati Tapin

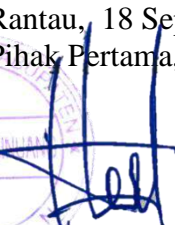

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. M. ARIFIN ARPAN

Rantau, 18 September 2023
Pihak Pertama,


H.HENDERIYANOOR EFENDI,S.Kep,Ners, MM
Penata Tk. I (III.d)
NIP. 19860101 201101 1 015

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Binuang
Tahun Anggaran : 2023


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	89 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layananan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,9 Poin

Program :	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.916.636.819,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.226.000,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.242.219.632,-	APBD
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	130.458.434,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	117.474.398,-	APBD
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.590.194,-	APBD
Jumlah Anggaran	8.480.605.477,-	

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

H. M. ARIFIN ARPAN

Pihak Pertama,

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep, Ners, MM
Penata Tk. I (III.d)
NIP. 19860101 201101 1 015

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ESTI SAPTO RINI, SP, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. HENDERIYANNOR EFENDI, S. Kep,Ners, MM**
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 18 September 2023

Pihak Kedua,

H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Pihak Pertama,

ESTI SAPTO RINI, SP, MM
NIP. 19721013 201406 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Pengukuran Kinerja) (Pelaporan Kinerja) (Evaluasi Internal)	Score 24.58 19.08 10.62 18.54
2.	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90%	100 %
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 Poin

Program

Anggaran

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5.916.636.819,-


Camat Binuang,


H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023

Sekretaris Kecamatan,


ESTI SAPTO RINI, SP, MM
NIP. 19721013 201406 2 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAYA RAHMAN, S.Kep, Ners**
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. HENDERIYANNOR EFENDI, S. Kep, Ners, MM**
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023

Pihak Pertama,

MAYA RAHMAN S.Kep, Ners
NIP. 19870812 201001 2 027

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Seksi Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan	Persentase rekomendasi pemerintahan yang diterbitkan	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang terlaksana	100 %
3	Terlaksananya pembinaan tentang dokumen pemerintahan desa	Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan	100 %
4	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa dengan serapan APBDes diatas 75%	100 %
5	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di desa	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu	100 %
6	Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset desa	Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36.266.000
2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.590.194
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	466.314.890

Camat Binuang

H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023
Kasi Pemerintahan

MAYA RAHMAN, S.Kep, Ners
NIP. 19870812 201001 2 027

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JURHANA YATI, S.AP**
Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. HENDERIYANNOR EFENDI, S. Kep,Ners, MM**
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023
Pihak Pertama,

JURHANA YATI, S.AP
NIP. 19760212 201001 2 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Seksi Pembangunan
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	75 %

Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.417.500

Camat Binuang

Binuang, 18 September 2023
Kasi Pembangunan



H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.KEP, NERS, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

JURHANA YATI, S.AP
NIP. 19760212 201001 2 004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. AMINAH, S.Pd, MM**
Jabatan : Kasi Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. HENDERYANNOR EFENDI, S. Kep,Ners, MM**
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 18 September 2023

Pihak Kedua,

H. HENDERYANNOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Pihak Pertama,

Hj. AMINAH, S.Pd, MM
NIP. 19800901 200904 2 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Seksi Perekonomian
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ekonomi Pedesaan	Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100%
2	Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang terlaksana	100 %

Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

10.795.083,-

Camat Binuang



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023
Kasi Perekonomian

Hj. AMINAH, S.Pd, MM
NIP. 19800901 200904 2 002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP**
Jabatan : Kasi Kesra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.Kep, Ners, MM**
Jabatan : Camat Binuang


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 18 September 2023

Pihak Kedua,


H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Pihak Pertama,


Hj. DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
NIP. 19701009 199303 2 007

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Seksi Kesejahteraan Rakyat
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang diterbitkan	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang terlaksana	100 %

Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

191.965.546,-


Binuang, 18 September 2023

Kasi Kesra,



HJ. DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
NIP. 19701009 199303 2 007

Camat Binuang,



H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I**
Jabatan : Kasi Trantib

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. HENDERIYANNOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM**
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

H. HENDERIYANNOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang , 18 September 2023

Pihak Pertama,



EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
NIP. 19800727 200904 1 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang terlaksana	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	130.458.434,-
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	117.474.398,-



Camat Binuang

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023

Kasi Trantib

EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
NIP. 19800727 200904 1 005

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DUANA, A.Ma.Pd
Jabatan : Plt.Lurah Karangang Putih

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camat Binuang

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023

Plt. Lurah Karangang Putih

DUANA, A.Ma.Pd

NIP. 19651211 198608 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Kerja : Kelurahan Karangam Putih
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Meningkatnya sarana dan prasarana Kelurahan Karangam Putih dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangam Putih	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|---------------|
| 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangam Putih | 226.000.000,- |
| 2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangam Putih | 267.242.250,- |
| Jumlah Anggaran | 493.242.250,- |

Camat Binuang



H. HENDERYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023

Plt. Lurah Karangam Putih



DUANA, A.Ma.Pd
NIP. 19651211 198608 1 002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JAIDI, A.Md.Kes
Jabatan : Lurah Raya Belanti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 18 September 2023

Lurah Raya Belanti

Camat Binuang

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015


JAIDI, A.Md.Kes
NIP. 19661015 198812 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Kerja : Kelurahan Raya Belanti
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pembangunan Meningkatkan sarana dan prasaraana Kelurahan Raya Belanti	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%
	dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Raya Belanti	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	252.500.000,-
2. Pemberdayaan Masyrakat Kelurahan Raya Belanti	274.660.050,-
Jumlah Anggaran	527.160.050,-

Camat Binuang

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Binuang, 18 September 2023
Lurah Raya Belanti

JAIDI, A.Md.Kes
NIP. 19661015 198812 1 002

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj.UMIE AMELEA ARTHA, SKM, MM
Jabatan : Lurah Binuang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
Jabatan : Camat Binuang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 18 September 2023

Lurah Binuang

Camat Binuang


H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015



Hj.UMIE AMELEA ARTHA, SKM, MM
NIP. 19710808 199203 2 007

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Kerja : Kelurahan Binuang
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Pembangunan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	Presentase Terlaksananya Pembangunan Saranadan Prasarana Kelurahan	100%
3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binuang	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	222.000.966,-
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binuang	317.029.834,-
Jumlah Anggaran	539.030.800,-

Binuang, 18 September 2023

Camat Binuang

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Lurah Binuang

Hj.UMIE AMELEA ARTHA, SKM, MM
NIP. 19710808 199203 2 007

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NELLY HARTATI, S.Pd, MM**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ESTI SAPTO RINI, SP, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Kecamatan

ESTI SAPTO RINI, SP, MM
NIP. 19721013 201406 2 001

Binuang, 18 September 2023
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

NELLY HARTATI, S.Pd, MM
NIP. 19880824 201503 2 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi mitra kerja Bappelitbang	100 %
2.	Meningkatnya kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.008.000,- |
| 2. Administrasi Keuangan perangkat Daerah | 3.430.940.729,- |

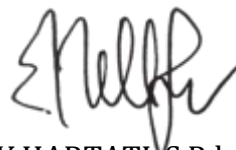
Binuang, 18 September 2023

Sekretaris Kecamatan,



ESTI SAPTO RINI, SP, MM
NIP. 19721013 201406 2 001

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan,



NELLY HARTATI, S.Pd, MM
NIP. 19880824 201503 2 002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWAN ASPANI, S.Kom**
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ESTI SAPTO RINI, SP, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 18 September 2023

Sekretaris Kecamatan,

ESTI SAPTO RINI, SP, MM
NIP. 19721013 201406 2 001

Kasubbag. Umum dan
Kepegawaian

ERWAN ASPANI, S.Kom
NIP. 198506092014031003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	2 %
2	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80 %
3	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	944.623.284
2. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	922.241.734
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	333.231.456
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.591.616

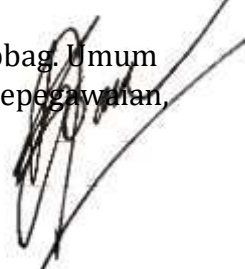
Binuang, 18 September 2023

Sekretaris Kecamatan,



ESTI SAPTO RINI, SP, MM
NIP. 19860101 201101 1 015

Kasubbag. Umum
dan Kepegawaian,



ERWAN ASPANI, S.Kom
NIP. 19850609 201403 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Seksi Pemerintahan
Unit Kerja : Pengadministrasi Pemerintahan
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Dokumen
5	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 Dokumen
6	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan

Sub Kegiatan**Anggaran**

- | | |
|---|-------------|
| 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2.208.750 |
| 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 8.835.000 |
| 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 2.208.750 |
| 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.208.750 |
| 5. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 22.128.944 |
| 6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 466.314.890 |

Binuang, 18 September 2023

Kasi Pemerintahan,

Pengadministrasi Pemerintahan,



MAYA RAHMAN, S.Kep,Ners, MM
NIP. 19870812 201001 2 027

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Seksi Pemerintahan
Unit Kerja : Pengadministrasi Kependudukan
Atas Nama : -
Tahun Anggaran 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 36.226.000

Binuang, 18 September 2023

Kasi Pemerintahan,

Pengadministrasi Kependudukan,



MAYA RAHMAN, S.Kep.Ners
NIP. 19870812 201001 2 027

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Seksi Pemerintahan
Unit Kerja : Pengadministrasi Pertanahan
Atas Nama :-
Tahun Anggaran 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

-

Binuang, 18 September 2023

Kasi Pemerintahan,

Pengadministrasi Pertanahan,



MAYA RAHMAN, S.Kep,Ners
NIP. 19870812 201001 2 027

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Seksi Pembangunan
Unit Kerja : Program dan Kegiatan Seksi Pembangunan
Atas Nama : SYARIANSYAH
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga Kemasyarakatan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-----------|
| 1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4.417.500 |
|---|-----------|

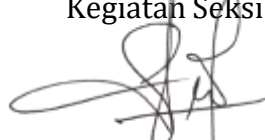
Binuang, 18 September 2023

Kasi Pembangunan,



JURHANA YATI, S.AP
NIP. 19760212 201001 2 004

Pengelola Program dan Kegiatan Seksi Pembangunan,



SYARIANSYAH
NIP. 19720827 201406 1 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Seksi Perekonomian
Unit Kerja : Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan
2	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|---|
| 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - |
| 2. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | - |

Binuang, 18 September 2023

Kasi Perekonomian,



Hj. AMINAH, S.Pd, MM
NIP.19800901 200904 2 002

Pengelola Pembinaan dan
Pengembangan Perekonomian,

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Seksi Kesejahteraan Sosial
Unit Kerja : Program dan Kegiatan Seksi Kesra
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|----------------|
| 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan | 131.755.353, - |
|--|----------------|

Binuang, 18 September 2023

Kasi Kesra,



HJ. DARMIYATI AYU, S.Sos, M.,AP
NIP. 19701009 199303 2 007

Pengelola Program dan
Kegiatan Seksi Kesra,

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Unit Kerja : Keamanan dan Ketertiban
Atas Nama : -
Tahun Anggaran 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Eka, Pemerintahan dan Pemeliharaan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Eka, Pemerintahan dan Pemeliharaan NKRI	100 Orang
3	Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-------------|
| 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 128.249.684 |
| 2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Eka, Pemerintahan dan Pemeliharaan NKRI | 117.474.398 |
| 3. Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 2.208.750 |

Binuang, 18 September 2023

Kasi Trantib,



EDY TRIRAHMADY, S.Pd.I
NIP. 19800727 200904 1 005

Pengelola data Keamanan
dan Ketertiban,

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Unit Kerja : Perencanaan
Atas Nama :-
Tahun Anggaran 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.008.000

Binuang, 18 September 2023

Kasubag Renkeu,

Pengelola Bahan Perencanaan,



NELLY HARTATI, S.Pd, MM
NIP. 19880824 201503 2 002

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Unit Kerja : Keuangan
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

3.426.141.515

Binuang, 18 September 2023

Kasubag Renkeu,

Bendahara,



NELLY HARTATI, S.Pd, MM
NIP. 19880824 201503 2 002

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Unit Kerja : Keuangan
Atas Nama :-
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen

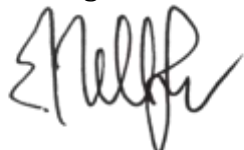
Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-----------|
| 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.399.200 |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.399.200 |

Binuang, 18 September 2023

Kasubag Renkeu,



NELLY HARTATI, S.Pd, MM
NIP. 19880824 201503 2 002

Pengelola Bahan Perencanaan,

.....

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Unit Kerja : Umum
 Atas Nama : -
 Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	1 Paket
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.532.966
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.681.243
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.809.413
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	729.028.156
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.045.456
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.777.040
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.408.960

Binuang, 18 September 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Pengadministrasi Umum,

ERWAN ASPANI, S.Kom
 NIP. 198506092014031003

.....

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG

Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Umum
Atas Nama : MAHDA YUNIAR EMHA, A.Md
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 Unit
3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
4	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	8 Laporan
6	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-------------|
| 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.655.616 |
| 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 209.936.000 |
| 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 446.227.928 |
| 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 476.013.806 |

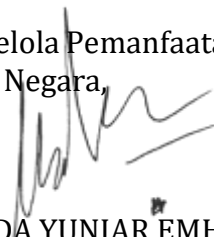
Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ERWAN ASPANI, S.Kom
NIP. 198506092014031003

Binuang, 18 September 2023

Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Negara,



MAHDA YUNIAR EMHA, A.Md
NIP. 19881103 301403 1 003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BINUANG**

Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Umum
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket

Sub Kegiatan

Anggaran


1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

91.571.506,-

Binuang, 18 September 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Pramu Kebersihan Kantor,


ERWAN ASPANI, S.Kom
NIP. 198506092014031003

.....

Lampiran 3 Matriks Renstra Kecamatan Binuang 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75	77		79		81		83		85		85		Kabupaten		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	78,11	80	85	86		87		88		89		89		Kecamatan		
				Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75	100	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan		
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)		100	342.973.201	100	366.399.101	100	476.598.996	100	518.914.289	100	475.373.035	100	2.180.258.622		Kecamatan	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)		12	10.973.201	12	11.663.701	12	14.660.556	12	16.125.005	12	17.696.398	60	71.118.861			

	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)			12	10.600.000	12	11.204.200	12	15.405.000	12	16.945.500	12	17.445.040	60	71.599.740		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)			12	8.000.000	12	10.456.000	12	12.547.200	12	13.801.920	12	14.147.200	60	58.952.320		
	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggadaan (bulan)			12	1.000.000	12	1.057.000	12	1.268.400	12	1.395.240	12	1.268.400	60	5.989.040		
	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)			12	15.000.000	12	15.855.000	12	19.026.000	12	20.928.600	12	20.681.000	60	91.490.600		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi (bulan)			12	60.000.000	12	63.420.000	12	78.000.000	12	85.800.000	12	90.000.000	60	377.220.000		
	Penyediaan jasa keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (org/bulan)			12	12.000.000	12	12.684.000	12	15.220.800	12	16.742.880	12	15.220.800	60	71.868.480		
	Pembinaan Administrasi Kelurahan	waktu penyediaan administrasi kelurahan (kelurahan)			36	149.100.000	36	162.398.700	36	230.878.440	36	253.966.284	36	212.878.440	180	1.009.221.864		
	Penyediaan Jasa Petugas E-Ktp	waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP (org/bulan)			24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	24.000.000	24	24.000.000	120	102.000.000		
	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Waktu pemeliharaan kebersihan lingkungan (bulan)			12	46.800.000	12	47.500.000	12	57.000.000	12	53.157.000	12	47.449.157	60	251.906.157		
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan)			12	1.000.000	12	1.057.000	12	1.268.400	12	1.395.240	12	1.268.400	60	5.989.040		
	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor (bulan)			12	500.000	12	528.500	12	634.200	12	697.620	12	634.200	60	2.994.520		
	Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional (kegiatan)			1	10.000.000	1	10.575.000	1	12.690.000	1	13.959.000	1	12.684.000	5	59.908.000		
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	69		80	96.290.383	80	105.407.835	80	137.866.043	80	139.217.336	80	158.105.439	80	636.887.036		Ke ca ma tan

	Pemeliharaan Rutin/berkala kend. Dinas operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional (bulan)			12	19.715.300	12	20.907.835	12	27.866.043	12	28.217.336	12	38.105.439	60	134.811.953		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (paket/unit)			4	43.500.000	116	10.500.000	15	80.000.000	10	86.000.000	10	85.000.000	155	305.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			12	2.000.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	17.500.000		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia (paket/unit)			1	5.000.000	3	60.000.000	2	13.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	11	103.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor (bulan)			12	26.075.083	12	11.500.000	12	14.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	60	76.575.083		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (%)			100	2.222.258.089	100	2.318.370.994	100	2.435.789.543	100	2.559.829.021	100	2.675.820.471	100	12.212.068.118	Kelurahan	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang (paket)			3	370.376.348	3	386.395.166	3	405.964.924	3	426.638.170	3	445.970.079	15	2.035.344.686		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang(bulan)			12	148.150.539	12	154.558.066	12	162.385.970	12	170.655.268	12	178.388.031	60	814.137.875		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang(unit)			3	222.225.809	3	231.837.099	3	243.578.954	3	255.982.902	3	267.582.047	15	1.221.206.812		

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Putih	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Putih (paket)			3	370.376.348	3	386.395.166	3	405.964.924	3	426.638.170	3	445.970.079	15	2.035.344.686		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Putih	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Putih (bulan)			12	148.150.539	12	154.558.066	12	162.385.970	12	170.655.268	12	178.388.031	60	814.137.875		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Putih	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Putih (unit)			3	222.225.809	3	231.837.099	3	243.578.954	3	255.982.902	3	267.582.047	15	1.221.206.812		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Raya Belanti	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Raya Belanti (paket)			3	370.376.348	3	386.395.166	3	405.964.924	3	426.638.170	3	445.970.079	15	2.035.344.686		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Raya Belanti	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Raya Belanti (bulan)			12	148.150.539	12	154.558.066	12	162.385.970	12	170.655.268	12	178.388.031	60	814.137.875		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Raya Belanti	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar Raya Belanti (unit)			3	222.225.809	3	231.837.099	3	243.578.954	3	255.982.902	3	267.582.047	15	1.221.206.812		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100	7.300.000	100	8.030.000	100	10.500.000	100	13.061.000	100	13.367.000	100	52.258.000		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)			13	5.300.000	13	5.530.000	13	7.500.000	13	9.061.000	13	9.367.000	65	36.758.000		

		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan)			2	2.000.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	10	15.500.000		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik			100	62.752.280	100	66.967.492	100	64.125.511	100	72.140.416	100	71.491.725	100	337.477.424	Kecamatan	
		Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kegiatan)			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	5	27.500.000		
		Koordinasi aparat pemerintahan desa	jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa (desa/kegiatan)			9	18.000.000	9	19.500.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	45	97.500.000		
		Koordinasi Pengawasan Dana Desa	waktu koordinasi pengawasan dana desa (bulan)			12	22.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	60	116.000.000		
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (bulan)			12	17.752.280	12	19.467.492	12	16.125.511	12	22.140.416	12	20.991.725	60	96.477.424		
		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan			100	10.500.000	100	11.000.000	100	12.000.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	58.500.000	Kecamatan	
	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			1	10.500.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	12.500.000	1	12.500.000	5	58.500.000			
Menu runnya tingkat penganggaran			Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,39		4,00		3,80		3,60		3,40		3,20		3,20			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			75		76		77		78		80		80			kecamatan
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan			100	33.804.408	100	35.348.150	100	41.292.363	100	44.080.765	100	47.142.348	100	201.668.034		

Usaha di Kecamatan	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan (kegiatan)			1	8.804.408	1	10.348.150	1	11.292.363	1	12.080.765	1	12.142.348	5	54.668.034		
	Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa (kegiatan)			1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	5	59.000.000		
	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan (kegiatan)			1	15.000.000	1	15.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	88.000.000		
	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan (%)			100	300.000.000	100	330.000.000	100	345.000.000	100	360.000.000	100	390.000.000	100	1.725.000.000	Kelurahan	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Binuang	waktu penyediaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan dan Keluarga Kelurahan Binuang			12	100.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	60	575.000.000		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karang Putih	waktu penyediaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan dan Keluarga Kelurahan Karang Putih			12	100.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	60	575.000.000		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti	waktu penyediaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan dan Keluarga Kelurahan Raya Belanti			12	100.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	60	575.000.000		
						3.075.878.361		3.241.523.572		3.523.172.456		3.719.742.827		3.843.800.018		17.404.117.234		

Lampiran 4. LHE SAKIP Kecamatan Binuang Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
R A N T A U

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Nomor : 700/046/Evaluasi SAKIP KEC. BINUANG/Wil.III/VIII/INSP/2023
Tanggal 11 Agustus 2023

O B R I K

KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762
RANTAU

11 Agustus 2023

Nomor : 700/046/Evaluasi SAKIP Kec. Binuang/Wil.III/VII/INSP/2023
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2022

Yth. **Camat Binuang Kabupaten Tapin**
di
Rantau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan Kecamatan Binuang memperoleh nilai **72,65** atau predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Pada Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot 2021	Nilai 2021	Bobot 2022	Nilai 2022
a. Perencanaan Kinerja	30		30	22,60
b. Pengukuran Kinerja	30		30	22,50
c. Pelaporan Kinerja	15		15	10,05
d. Evaluasi Internal	25		25	15,50
Nilai Hasil Evaluasi	100		100	72,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB

Dari hasil Evaluasi Laporan Kinerja Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
2. Terdapat dokumen laporan kinerja namun belum terdapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
3. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
4. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
5. Belum terdapat pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada unit kerja yang menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
6. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
7. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;
8. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
2. Menyajikan analisis dan evaluasi capaian dibanding dgn target nasional/internasional (Bencmark Kinerja) dalam laporan kinerja;

3. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya;
4. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai pengaruh terhadap budaya kinerja organisasi;
5. Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
6. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
7. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;
8. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Inspektur,

Unda Absori, SH.MH

Pembina Tk.I

NIP. 19700722 200501 1 013

LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI SAKIP KECAMATAN BINUANG TAHUN 2022

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Pengukuran Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran Capaian Kinerja Belum memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecamatan Binuang telah melaksanakan pengukuran Capaian Kinerja dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Pengukuran Kinerjanya melalui https://esakip.tapinkab.go.id/ ➤ Mulai Tahun 2024 Kecamatan Binuang telah memanfaatkan Aplikasi <i>Google Drive</i> sebagai media pelaporan capaian kinerja. Setiap seksi dan subbagian mengupload data dukung capaian kinerja ke link google drive: https://tinyurl.com/MONEVKINERJABINUANG2024 setiap triwulannya untuk memudahkan pengukuran capaian kinerja. ➤ Kecamatan Binuang juga menyiapkan aplikasi monev internal untuk pengukuran capaian kinerja (<i>SIMONIKA BINUANG : Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binuang</i>). Aplikasi ini masih dalam tahap pembuatan, dan ditargetkan sudah dapat digunakan pada Triwulan III Tahun 2024
2	<p>Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Dokumen Laporan Kinerja namun belum terdapat menginfokan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) 	<p>Kecamatan Binuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini telah menginfokan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level Nasional (Benchmark Kinerja)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan di hadapi tahun berikutnya 	<p>Kecamatan Binuang telah menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya. Hal ini terlihat dalam rangka penyusunan pohon kinerja dan <i>cascading</i> kinerja menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi 	<p>Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Informasi dalam laporan kinerja menjadi pendorong motivasi setiap pegawai Kecamatan Binuang untuk terus meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, serta terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.</p> <p>Perubahan budaya kinerja ini dapat dilihat dari keberhasilan Kecamatan Binuang meraih penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.</p>
3	<p>Evaluasi Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal pada unit kerja yang menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecamatan Binuang telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Pengukuran Kinerja nya melalui https://esakip.tapinkab.go.id/ ➤ Mulai Tahun 2024 Kecamatan Binuang telah memanfaatkan Aplikasi Google Drive sebagai media pelaporan capaian kinerja. Setiap seksi dan subbagian mengupload data dukung capaian kinerja ke link google drive: https://tinyurl.com/MONEVKINERJABINUANG2024 setiap triwulannya untuk memudahkan monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja. ➤ Kecamatan Binuang juga menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal (<i>SIMONIKA BINUANG : Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binuang</i>). Aplikasi ini masih dalam tahap pembuatan, dan ditargetkan sudah dapat digunakan pada Triwulan

		III Tahun 2024.
	<p>- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum di manfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Binuang. Hal ini terlihat dalam penyusunan pohon kinerja dan <i>cascading</i> kinerja menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja juga ditindaklanjuti seluruhnya oleh Kecamatan Binuang mulai dari penggunaan teknologi informasi hingga penyajian informasi perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di level Nasional (Benchmark Kinerja).</p>
	<p>- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum di manfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja</p>	<p>Kecamatan Binuang telah memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi esakip https://esakip.tapinkab.go.id/ dan <i>google drive</i> untuk pengukuran dan monev capaian kinerja. Dan kedepannya Kecamatan Binuang akan memiliki aplikasi internal untuk pengukuran dan monev kinerja (<i>SIMONIKA BINUANG: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Binuang</i>). Kecamatan Binuang juga menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik diantaranya SIMPANAN BINUANG (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Binuang), WADUL (WA atau DM untuk Lapo), SUPERMAN (Sudut Permainan dan Edukasi Minat Anak), SUNAMI (Sudut Nambah Ilmu), dan SIJUMANJI (Aksi Jumat ASN dan Masyarakat Bikin Janji).</p>
	<p>- Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal</p>	<p>Kecamatan Binuang terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Rekomendasi Hasil Evaluasi tersebut ditindaklanjuti seluruhnya oleh Kecamatan Binuang. Hasilnya, kinerja Kecamatan Binuang terus membaik dan meningkat</p>

		dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 Kecamatan Binuang berhasil menjadi Unit Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
--	--	--

Binuang, Februari 2024

Camat Binuang,



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM

Penata Tk I / III d

NIP. 19860101 201101 1 015

Lampiran 6 Daftar Prestasi Kecamatan Binuang Tahun 2023

No	Prestasi	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2023	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2	Lulusan Terbaik Kedua dengan Kualifikasi SANGAT MEMUASKAN pada Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 atas nama: H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners, MM (Camat Binuang)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan
3	Finalis Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 atas Inovasi SUPERMAN (Sudut Permainan dan Edukasi Minat Anak)	Pj Bupati Tapin
4	Mampu Memenuhi Target Badan Hukum BUMDesa Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2022	Bupati Tapin
5	Juara III Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Piagam belum diserahkan oleh Pemprov Kalsel ke Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang)
6	Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin
7	Juara I Lomba Asman Toga Tingkat Kabupaten Tapin Tahun	Bupati Tapin

	2023 (Desa Padang Sari Kecamatan Binuang)	
8	Juara I Lomba Asman Toga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Desa Padang Sari Kecamatan Binuang)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
9	Juara I Lomba Posyandu Balita Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin
10	Juara I Lomba Masak Serba Ikan (Menu Balita) Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023	Bupati Tapin
11	Juara III Lomba Masak B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) a.n. Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin
12	Lomba Jambore Posyandu Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Juara 1 Lomba Penyuluhan ➤ Juara 1 Penampilan Kontingen (Yel-Yel) ➤ Juara 1 Lomba Penimbangan dan Pengisian KMS ➤ Juara Kader terbaik berprestasi Kab.Tapin (a.n. Ibu Wiwit Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang) 	Ketua TP PKK Kabupaten Tapin (Piagam belum diserahkan TP PKK Kabupaten Tapin ke Kecamatan Binuang)
13	Juara III Lomba Hatinya PKK Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang)	Bupati Tapin

14	Juara I Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang) dengan pedikat KATEGORI UTAMA	Gubernur Kalimantan Selatan
15	Lomba Jambore PKK Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Juara Harapan 1 Lomba Administrasi PKK ➤ Juara Harapan 2 Lomba Cerdas Cermat Ceria ➤ Juara Harapan 3 Lomba Yel-Yel Pesan Berantai ➤ Juara Harapan I Lomba Menghias Kue 	Ketua TP PKK Kabupaten Tapin

1. Piagam Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”
Tahun 2023



2. Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2023 dengan kualifikasi **SANGAT MEMUASKAN** a.n. Camat Binuang, H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM.



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: 00008109/PKA/6800/011/LAN-PEM PROV KALSEL/2023

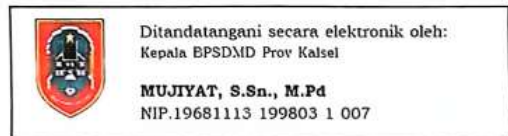
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa:



Nama	: H. Henderianoor Efendi, S.Kep., Ners, M.M
Nomor Identitas	: 198601012011011015
Tempat, Tanggal Lahir	: Tapin, 01 Januari 1986
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina Tingkat I, III/D
Jabatan	: Camat Binuang Kabupaten Tapin
Instansi	: Pemerintah Kab. Tapin
Kualifikasi	: SANGAT MEMUASKAN
Judul Aksi Perubahan	: OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM INFORMASI PELAYANAN KECAMATAN BINUANG (SIMPANAN BINUANG)

telah memenuhi kompetensi manajerial Jabatan Administrator pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 13 Desember 2023 di Banjarbaru selama 908 (sembilan ratus delapan) Jam Pelajaran.

BANJARBARU, 14 DESEMBER 2023

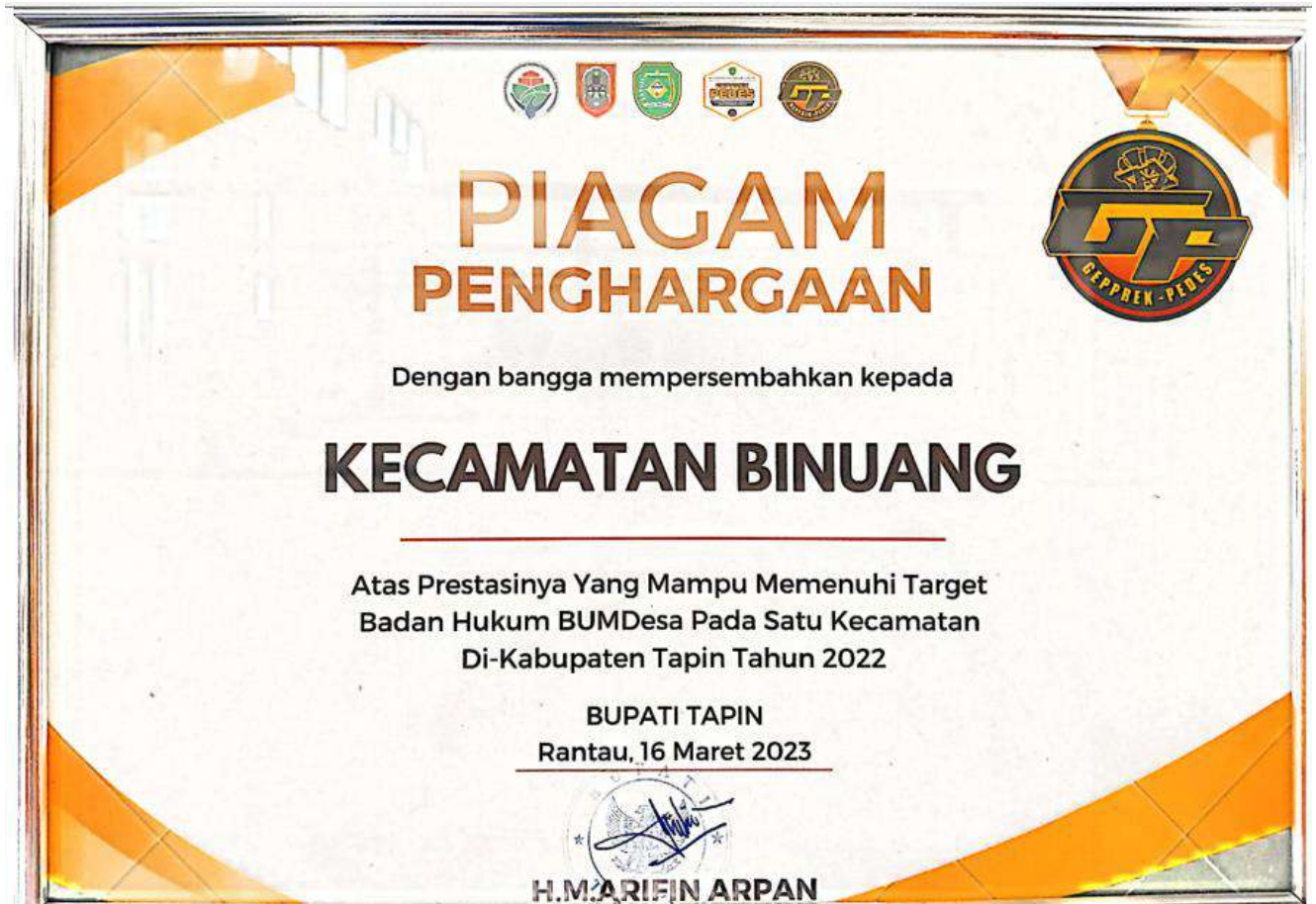


* Dokumen ini ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sesuai UU ITE Pasal 11, tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

3. Piagam Finalis Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023
atas Inovasi SUPERMAN (Sudut Permainan dan Edukasi Minat Anak)



4. Piagam atas Prestasinya yang Mampu Memenuhi Target Badan Hukum BUMDesa Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2022



5. Piagam Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Kelurahan Bnuang Kecamatan Bnuang)



6. Piagam Penghargaan **KATEGORI UTAMA** Desa Peningkatan Kualitas Keluarga Terbaik pada Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (atas nama Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang)



7. Piagam Penghargaan Juara Harapan I Lomba Administrasi PKK Kecamatan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023



8. Piagam Penghargaan Juara Harapan III Lomba Cerdas Cermat Ceria Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023



9. Piagam Penghargaan Juara Harapan III Lomba Yel-Yel Pesan Berantai Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023



10. Piagam Penghargaan Juara Harapan I Lomba Menghias Kue Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023



11. Piagam Penghargaan Juara I Menu Balita Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023



12. Piagam Penghargaan Peringkat I Kategori Daerah Pedesaan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Tradisional Melalui Pemanfaatan Toga dan Akupresur Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 a.n. Kelompok Asman Toga Alam Asri Desa Padang Sari, Kecamatan Binuang.



13. Piagam Penghargaan Peringkat I Kategori Daerah Perdesaan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Tradisional Melalui Pemanfaatan Toga dan Akupresur Tingkat Kabupaten Tapin 2023 a.n. Kelompok Asman Toga Alam Asri Desa Padang Sari, Kecamatan Binuang



14. Piagam Penghargaan Juara III Lomba AKU HATINYA PKK Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 a.n. Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang



15. Piala Juara I Penilaian Posyandu Balita Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 a.n Desa A Yani Pura Kecamatan Binuang



16. Piala dan Piagam Juara III Lomba Masak B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) (Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang)





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183

Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BINUANG
TAHUN 2023

CAMAT BINUANG,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang dengan Keputusan Camat Binuang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain:
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Binuang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binuang
pada tanggal 3 Januari 2023

Camat Binuang,


EKO HARYONO, SE,MM
NIP. 19781001 201001 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN BINUANG
TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	CAMAT BINUANG
2	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN BINUANG
3	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	Anggota	a. KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5	Anggota	b. KASI PEMERINTAHAN
6	Anggota	c. KASI PEMBANGUNAN
7	Anggota	d. KASI PEREKONOMIAN
8	Anggota	e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
9	Anggota	f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN


Camat Binuang,

EKO HARYONO, SE,MM
NIP. 19781001 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183

Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BINUANG

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BINUANG TAHUN 2023**

CAMAT BINUANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Binuang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binuang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi, Uraian Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binuang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Binuang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binuang
Pada tanggal 23 Oktober 2023
CAMAT BINUANG,



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM.
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19860101 201101 1 015

Lampiran : Keputusan Camat Binuang
 Nomor : 45 Tahun 2023
 Tanggal : 23 Oktober 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survei tingkat kepuasan pelayanan	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)	Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)	Agar Dapat Mengetahui Data dan Informasi Hasil dari Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori indeks Kepuasan Masyarakat Minimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik)
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Rekomendasi diselesaikan (Semua Kasi)	Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh Kecamatan yang Memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Semua Kasi)	Pengaduan yang diselesaikan Baik melalui Mediasi atau dengan cara-cara lain
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keu. Desa sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)	Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)	Pengelolaan Aset Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	$\frac{\text{Jumlah desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik}}{\text{Jumlah desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik (Kasi Pemerintahan)	Data Kependudukan Terverifikasi yang diterima dari Desa/Kelurahan

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)	Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bobot Maksimal Komponen yang dinilai: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kinerja=30 - Pengukuran Kinerja=30 - Pelaporan Kinerja=15 - Evaluasi Internal=25
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Camat	Nilai IP-ASN (Sekcam)	Berdasarkan Permen PAN &RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

CAMAT BINUANG,



H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM.
 Penata Tk. I/III.d
 NIP. 19860101 201101 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Binuang, Senin 10 April 2023

Nomor : 000/067/BNG/SEKRT/IV/2023
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi Internal
Kecamatan Binuang

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr/i

Pegawai Kantor
Kecamatan Binuang

Di Binuang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan I Tahun 2023, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I untuk berhadir pada acara Rapat Koordinasi Internal yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 April 2023

Waktu : Pukul 09:00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja
Triwulan I Tahun 2023

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara Elektronik oleh
Camat Binuang

Eko Haryono, SE., MM
NIP. 19781001 201001 1 013





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

NOTULEN

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang
Waktu : 09.00 - Selesai
Acara : Rapat Koordinasi Internal Kecamatan Binuang
Agenda : Monev Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan I Tahun 2023
Pimpinan Rapat : Eko Haryono, SE,MM
Notulis : Nelly Hartati, S.Pd,MM

Rapat dipimpin langsung oleh Camat Binuang, Eko Haryono, SE,MM dan dihadiri sekretaris, para kasi dan kasubbag serta staf Kecamatan Binuang. Adapun poin yang disampaikan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi rencana aksi dan realisasi capaian Triwulan I 2023 pada sekretariat dan tiap-tiap seksi Kecamatan Binuang.
2. Pembahasan mengenai serapan anggaran per 31 Maret 2023 dan kegiatan apa saja yang sudah berjalan dan bagaimana progresnya.
3. Penyampaian dari Sekretariat dan tiap-tiap seksi terkait capaian kinerja triwulan I 2023.
 - a) Sekretariat
Target Kinerja pada triwulan I sudah tercapai baik dari subbagian umum dan kepegawaian maupun subbagian perencanaan dan keuangan. Untuk pengadaan barang milik daerah yakni Laptop dan PC sudah terlaksana dengan mekanisme e-purchasing, begitu juga belanja makan-minum rapat dan kegiatan. Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja TA. 2022 juga selesai dibuat tepat waktu yakni: LKPJ, LPPD, LK, dan LKIP TA 2022.
 - b) Kasi Pembangunan
Target Kinerja pada triwulan I sudah tercapai. Musrenbang Kecamatan Binuang sudah dilaksanakan pada bulan Februari 2023. Usulan masyarakat (RKPDes) sudah diakomodir di Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya akan dilaksanakan monitoring kegiatan Pembangunan di desa-desa untuk dilaporkan kepada Camat Binuang.
 - c) Kasi Pemerintahan
Target Kinerja pada triwulan I juga sudah tercapai sesuai rencana. Semua desa sudah menyampaikan laporan rekomendasi pencairan APBdes. Setiap Desa juga sudah mengumpulkan Perdes dan Perkades.
 - d) Kasi Kesra
Target Kinerja pada triwulan I juga sudah tercapai sesuai rencana. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan I ini ialah pelayanan rekomendasi SKTM, Rekomendasi Nikah, dan proposal permohonan bantuan. Juga sudah dilaksanakan kegiatan PHBI yakni Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad, dan rapat bulanan TP PKK bulan Januari, Februari, dan Maret 2023. Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang sudah terlaksana diantaranya pembinaan Asman Toga, posyandu, dan Hatinya PKK, Untuk kegiatan sosialisasi pencegahan stunting akan dilaksanakan pada triwulan ke II.

e) Kasi Perekonomian

Target Triwulan I untuk seksi perekonomian juga tercapai sesuai rencana. Kegiatan pelayanan rekomendasi izin usaha mikro kecil terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk kegiatan penguatan BUMDes akan dilaksanakan pada TW II.

f) Kasi Trantib

Target Kinerja pada triwulan I sudah tercapai. Semua aduan yang masuk ke Kecamatan Binuang sudah ditindaklanjuti dan selesai. Aduan tersebut diantaranya terkait penumpukkan sampah di TPS, dan sudah dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk diangkut. Untuk ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Binuang, kita terus berkoordinasi dengan Polsek, Koramil, dan Kepala Desa/Lurah.

Dari hasil monev ini dapat disimpulkan bahwa target kinerja triwulan I TA 2023 telah tercapai dengan baik. Diharapkan kegiatan monev ini dapat memupuk silaturahmi, motivasi, dan *teamwork* para pegawai untuk tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Binuang.

Notulis



Nelly Martati, S.Pd,MM

DOKUMENTASI KEGIATAN
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan I Tahun 2023
(Selasa, 11 April 2023 bertempat di Ruang Rapat Kecamatan Binuang)



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal

: Selasa, 11 April 2023

Tempat



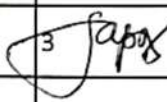



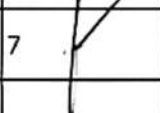


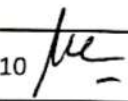

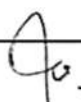
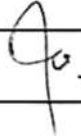


: Ruang Rapat Kecamatan Binuang

Acara

: Rapat Koordinasi Internal

Agenda

: Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Eko Haryono	Camat	Bng	1 
2	H. Hendenyanor E	Sekcam	sl. Jawa	2 
3	ESTI SAPTO RINI	Kasi Pem	Bng	3 
4	Kelly Hartati	Kasubag Umpeg	Bng	4 
5	Durhana Yati	Kasubag Renteu	BNG	5 
6	Syariansyah	STAF	Binuang	6 
7	Gwan Jipri	Pankom	Binuang	7 
8	Mafza Rahman	Kasi Trantib	Binuang	8 
9	Edy T.	Kasi pembg.	BNG	9 
10	Mahz Nur Rizka	Bendahara	Bng	10 
11	Hj. Aminah	Kasi Perakommu	BNG	11 
12	NOORHAMIPAH	staf	Binuang	12 
13	Hj. Ayu	Kasi Kesra	Binuang	13 
14	Duana	Staf	Bng	14 
15	M.Mirza	STAFF	Bng	15 
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

**Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023
Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin**

Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target IKU				Anggaran Rp	Realisasi IKU TW I	Unit Penanggung Jawab	
				TRIWULAN							Satuan
				I	II	III	IV				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					72,82	Score	0	Camat		
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)			0	0	24,58	0	Score	0	Camat	
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)			0	0	19,08	0	Score	0		
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)			0	0	10,62	0	Score	0		
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)			0	0	18,54	0	Score	0		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	25	25	25	25	%	4.622.699.912	25	Sekcam
			Persentase efisiensi penggunaan anggaran	25	25	25	25	%		25	
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	25	25	25	25	%		25	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	25	25	25	25	%	6.008.000	25	Kasubbag Renkeu
			Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	25	25	25	25	%		25	
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	25	25	25	25	%		25	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	2	1	Laporan	6.008.000	5	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	25	25	25	25	%	3.430.943.695	25	Kasubbag Renkeu
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	25	25	25	25	%		25	
			persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	25	25	25	25	%		25	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	32	32	Orang	3.426.145.295	32	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	Laporan	2.399.200	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	0	0	1	0	Laporan	2.399.200	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN				2	%	589.123.121	0	Kasubbag Umpeg
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat				70	Poin		0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	Paket	1.484.190	1	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	Paket	21.268.863	1	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Paket	66.483.776	3	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	3	Paket	4.890.292	3	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	Laporan	494.996.000	3	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	157.645.628	0	Kasubbag umpeg
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	0	10	Unit	157.645.628	2	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	2	Unit	371.583.000	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	238.537.280	0	Kasubbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3	3	Laporan	4.489.200	3	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	Laporan	44.781.840	3	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Laporan	189.266.240	3	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	200.442.188	0	Kasubbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	3	3	Unit	45.506.188	3	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	4	0	0	Unit	154.936.000	0	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			0	0	0	89	Poin		0	Camat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B			25	25	25	25	%		25	Camat
	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			25	25	25	25	%		25	

Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			25	25	25	25	%		25		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B		25	25	25	25	%	2.198.558.089	25	Camat	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi kegiatan keagamaan pada seksi Kesejahteraan Rakyat ditindaklanjuti		25	25	25	25	%	146.967.936	25	Kasi Kesra	
	Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan		25	25	25	25	%		25	Kasi Kesra	
	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat pada seksi Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjut		25	25	25	25	%		25	Kasi Kesra	
	Persentase laporan pada seksi Pembangunan		25	25	25	25	%		25	Kasi Pembangunan	
Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan		25	25	25	25	%		25	Kasi Pembangunan		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		12	0	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	4.417.500	12		
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3	3	3	3	Laporan	142.550.436	3		
Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0	0	0	100	%	2.051.590.153	0	Lurah Binuang, Lurah Raya Belanti, Lurah Karang Putih	
	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		25	25	25	25	%		25		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0	0	0	6	Unit	741.420.000	0		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12	12	12	12	Pokmas / Ormas	1.310.170.153	12		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan		25	25	25	25	%	4.417.500	25	Camat	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan pada seksi Trantib Trantib		25	25	25	25	%	4.417.500	25	Kasi Trantib	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3	3	3	3	Laporan	2.208.750	3		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		3	3	3	3	Laporan	2.208.750	3		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		25	25	25	25	%	23.065.490	25	Camat	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Trantib yang ditindaklanjuti		25	25	25	25	%	23.065.490	25	Kasi Trantib	
Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	0	100	0	Orang	23.065.490	0		
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		0	0	0	89	Poin		0	Camat	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan		25	25	25	25	%		25	Camat	
	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik		25	25	25	25	%		25		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan Dalam Pelayanan		25	25	25	25	%	37.590.194	25	Camat	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan		25	25	25	25	%	37.590.194	25	Kasi Pemerintahan
		Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)		25	25	25	25	%		25	
		Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik		0	0	0	100	%		0	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	3	
	Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		24	24	24	24	Dokumen	8.835.000	24	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	3	
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		3	3	3	3	Laporan	22.128.944	3	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	3	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik		25	25	25	25	%	36.226.000	25	Camat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kependudukan Desa/Kelurahan		11	11	11	11	Laporan	36.226.000	11	Kasi Pemerintahan	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3	3	3	3	Laporan	36.226.000	3		

Binuang, April 2023
Camat Binuang,

EKO HARYONO, SE,MM
NIP. 19781001 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Binuang, Senin 10 Juli 2023

Nomor : 000/122/BNG/SEKRT/VII/2023
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi Internal
Kecamatan Binuang

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr/i

**Pegawai Kantor
Kecamatan Binuang**

Di Binuang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan II Tahun 2023, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I untuk berhadir pada acara Rapat Koordinasi Internal yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 Juli 2023

Waktu : Pukul 09:00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja
Triwulan II Tahun 2023

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara Elektronik oleh
Camat Binuang

Eko Haryono, SE., MM
NIP. 19781001 201001 1 013





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

NOTULEN

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang
Waktu : 09.00 - Selesai
Acara : Rapat Koordinasi Internal Kecamatan Binuang
Agenda : Monev Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan II Tahun 2023
Pimpinan Rapat : Eko Haryono, SE,MM
Notulis : Nelly Hartati, S.Pd,MM

Rapat dipimpin langsung oleh Camat Binuang, Eko Haryono, SE,MM dan dihadiri sekretaris, para kasi dan kasubbag serta staf Kecamatan Binuang. Adapun poin yang disampaikan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi rencana aksi dan realisasi capaian Triwulan II 2023 pada sekretariat dan tiap-tiap seksi Kecamatan Binuang.
2. Pembahasan mengenai serapan anggaran per 30 Juni 2023 dan kegiatan apa saja yang sudah berjalan dan bagaimana progresnya.
3. Penyampaian dari Sekretariat dan tiap-tiap seksi terkait capaian kinerja triwulan II 2023.
 - a) Sekretariat
Target Kinerja pada triwulan II sudah tercapai baik dari subbagian umum dan kepegawaian maupun subbagian perencanaan dan keuangan. Untuk Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor sudah terlaksana dengan mekanisme belajar langsung ke Pihak ke-3. Untuk belanja makanan dan minuman sekretariat Triwulan II terlaksana dengan mekanisme e-purchasing, begitu juga belanja makan-minum rapat dan kegiatan. Pengumpulan data untuk Laporan Keuangan Semesteran TA 2023 juga sudah selesai, dan sekarang memasuki tahap penyusunan Laporan.
 - b) Kasi Pembangunan
Target Kinerja pada triwulan II sudah tercapai. Pelayanan Rekomendasi dari Seksi Pembangunan berjalan lancar, begitu pula dengan monev Pembangunan di desa-desa juga sudah dilaksanakan dan disampaikan laporannya ke Camat Binuang. Untuk musrenbangdes akan dilaksanakan pada akhir TW III.
 - c) Kasi Pemerintahan
Target Kinerja pada triwulan II juga sudah tercapai sesuai rencana. Semua desa sudah menyampaikan laporan rekomendasi pencairan APBdes. Setiap Desa juga sudah mengumpulkan Perdes dan Perkades. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset desa juga sudah terlaksana di TW II ini.
 - d) Kasi Kesra
Target Kinerja pada triwulan II juga sudah tercapai sesuai rencana. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan II ini ialah pelayanan rekomendasi SKTM, Rekomendasi Nikah, dan proposal permohonan bantuan. Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang sudah terlaksana di TW II diantaranya pembinaan Asman Toga, posyandu, dan Hatinya PKK, Administrasi PKK, dan PHBS. Selain itu juga terlaksana Kegiatan Penguatan KPM dan Penandatanganan Komitmen TPPS.

e) Kasi Perekonomian

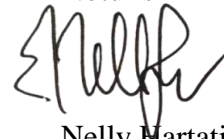
Target Triwulan II untuk seksi perekonomian juga tercapai sesuai rencana. Kegiatan pelayanan rekomendasi izin usaha mikro kecil terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan Monev BUMDes ke I juga sudah terlaksana. Kegiatan Monev BUMDes selanjutnya akan dilaksanakan di TW III.

f) Kasi Trantib

Target Kinerja pada triwulan II sudah tercapai. Semua aduan yang masuk ke Kecamatan Binuang sudah ditindaklanjuti dan selesai. Aduan tersebut diantaranya terkait Wahana Bermain dan Pasar Malam yang beroperasi di Jadwal Ulangan Sekolah. Sudah ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Pengelola/Ketua Penyelenggara Wahana Bermain dan Pasar Malam. Serta dibuat Surat Rekomendasi Camat terkait Pengaturan Jadwal Buka Wahana Bermain dan Pasar Malam. Untuk ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Binuang, kita terus berkoordinasi dengan Polsek, Koramil, dan Kepala Desa/Lurah.

Dari hasil monev ini dapat disimpulkan bahwa target kinerja triwulan II TA 2023 telah tercapai dengan baik. Diharapkan kegiatan monev ini dapat memupuk silaturahmi, motivasi, dan *teamwork* para pegawai untuk tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Binuang.

Notulis



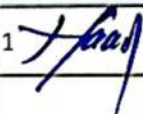

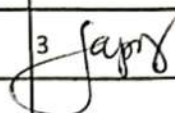

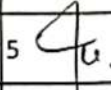
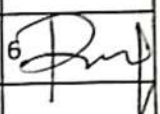
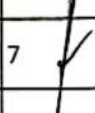

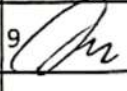

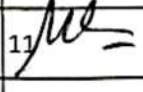
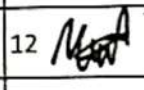
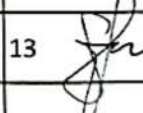


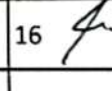
Nelly Martati, S.Pd,MM

DOKUMENTASI KEGIATAN
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan II Tahun 2023
(Selasa, 11 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Kecamatan Binuang)



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
 Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang
 Acara : Rapat Koordinasi Internal
 Agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Eko Haryono	Camat	BNG	1 
2	H. Henderyanar E	Sekcam	JL. Jawa	2 
3	Est. Supri P	Kasi Pemerintahan		3 
4	Edy Trirah mady	Kasi Pemb.		4 
5	Hj. Aminah	Kasi Ekonomi		5 
6	Maya Rahman	Kasi Trantib	Bng	6 
7	Iwan Aspin	Prakom	Binuang	7 
8	Kelly Hartati	Kasubbag Renku	Binuang	8 
9	Jurhana Yati	Kasubbag Renku	Binuang	9 
10	Hj. Darmiyati Ayu	Kas. Kasra	BNG	10 
11	Wahid Umar Erta	Bendah		11 
12	M. Mirza	Staff		12 
13	Syariansyah	Staf		13 
14	Deana	staf	RNC	14 
15	NORNA HIDAYATI	STAF		15 
16	MOORHAMIPAH	Staff	Binuang	16 
17				17
18				18
19				19
20				20

**Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin**

Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target IKU				Anggaran Rp	Realisasi IKU TW II	Unit Penanggung Jawab	
				TRIWULAN							Satuan
				I	II	III	IV				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					72,82	Score	0	Camat		
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)			0	0	24,58	0	Score	0	Camat	
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)			0	0	19,08	0	Score	0		
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)			0	0	10,62	0	Score	0		
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)			0	0	18,54	0	Score	0		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	25	25	25	25	%	4.622.699.912	50	Sekcam
			Persentase efisiensi penggunaan anggaran	25	25	25	25	%		50	
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	25	25	25	25	%		50	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	25	25	25	25	%	6.008.000	50	Kasubbag Renkeu
			Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	25	25	25	25	%		50	
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	25	25	25	25	%		50	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	2	1	Laporan	6.008.000	7	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	25	25	25	25	%	3.430.943.695	50	Kasubbag Renkeu
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	25	25	25	25	%		50	
			persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	25	25	25	25	%		50	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	32	32	Orang	3.426.145.295	32	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	Laporan	2.399.200	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	0	0	1	0	Laporan	2.399.200	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peringkatan kapasitas ASN				2	%	589.123.121	0	Kasubbag Umpeg
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat				70	Poin		0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	Paket	1.484.190	1	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	Paket	21.268.863	1	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Paket	66.483.776	6	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	3	Paket	4.890.292	6	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	Laporan	494.996.000	6	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	157.645.628	0	Kasubbag umpeg
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	0	10	Unit	157.645.628	2	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	2	Unit	371.583.000	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	238.537.280	0	Kasubbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3	3	Laporan	4.489.200	6	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	Laporan	44.781.840	6	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Laporan	189.266.240	6	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	200.442.188	0	Kasubbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	3	3	Unit	45.506.188	6	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	4	0	0	Unit	154.936.000	4	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			0	0	0	89	Poin		0	Camat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B			25	25	25	25	%		25	Camat
	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			25	25	25	25	%		25	

Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			25	25	25	25	%		25	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	25	25	25	25	%	2.198.558.089	50	Camat
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi kegiatan keagamaan pada seksi Kesejahteraan Rakyat ditindaklanjuti	25	25	25	25	%	146.967.936	50	Kasi Kesra
		Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	25	25	25	25	%		50	Kasi Kesra
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat pada seksi Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	25	25	25	25	%		50	Kasi Kesra
		Persentase laporan pada seksi Pembangunan	25	25	25	25	%		50	Kasi Pembangunan
		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	25	25	25	25	%		50	Kasi Pembangunan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	0	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	4.417.500	12	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	Laporan	142.550.436	6	
	Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	100	%	2.051.590.153	0	Lurah Binuang, Lurah Raya Belanti, Lurah Karang Putih
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25	25	25	25	%		50	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	6	Unit	741.420.000	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	12	12	12	Pokmas / Ormas	1.310.170.153	12	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	25	25	25	25	%	4.417.500	50	Camat
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan pada seksi Trantib Trantib	25	25	25	25	%	4.417.500	50
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	3	3	3	Laporan	2.208.750	6	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	3	3	3	Laporan	2.208.750	6	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	25	25	25	25	%	23.065.490	50	Camat
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Trantib yang ditindaklanjuti	25	25	25	25	%	23.065.490	50
Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	100	0	Orang	23.065.490	0		
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		0	0	0	89	Poin		0	Camat
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan		25	25	25	25	%		50	Camat
	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik		25	25	25	25	%		50	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan Dalam Pelayanan	25	25	25	25	%	37.590.194	50	Camat
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	25	25	25	25	%	37.590.194	50	Kasi Pemerintahan
		Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)	25	25	25	25	%			
		Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik	0	0	0	100	%		0	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	6	
	Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	24	24	24	Dokumen	8.835.000	48	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	6	
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	3	3	3	Laporan	22.128.944	6	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	6	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	25	25	25	25	%	36.226.000	50	Camat
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kependudukan Desa/Kelurahan	11	11	11	11	Laporan	36.226.000	22
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	Laporan	36.226.000	6	

Binuang, Juli 2023
Camat Binuang,

EKO HARYONO, SE,MM
NIP. 19781001 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Binuang, Senin 2 Oktober 2023

Nomor : 000/172/BNG/SEKRT/X/2023
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi Internal
Kecamatan Binuang

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr/i

Pegawai Kantor
Kecamatan Binuang

Di Binuang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan III Tahun 2023, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I untuk berhadir pada acara Rapat Koordinasi Internal yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023

Waktu : Pukul 09:00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja
Triwulan III Tahun 2023

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara Elektronik oleh :

Camat Binuang
Kabupaten Tapin

H. Henderiyanoor Efendi, S. Kep, Ners, MM
Penata Tk.I / (III/d)
NIP. 19860101 201101 1 015





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

NOTULEN


Hari/ Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang
Waktu : 09.00 - Selesai
Acara : Rapat Koordinasi Internal Kecamatan Binuang
Agenda : Monev Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan III Tahun 2023
Pimpinan Rapat : H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners,MM
Notulis : Nelly Hartati, S.Pd,MM

Rapat dipimpin langsung oleh Camat Binuang, H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners,MM dan dihadiri sekretaris, para kasi dan kasubbag serta staf Kecamatan Binuang. Adapun poin yang disampaikan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi rencana aksi dan realisasi capaian Triwulan III 2023 pada sekretariat dan tiap-tiap seksi Kecamatan Binuang.
2. Pembahasan mengenai serapan anggaran per 30 September 2023 dan kegiatan apa saja yang sudah berjalan dan bagaimana progresnya.
3. Penyampaian dari Sekretariat dan tiap-tiap seksi terkait capaian kinerja triwulan III 2023.
 - a) Sekretariat
Target Kinerja pada triwulan III sudah tercapai baik dari subbagian umum dan kepegawaian maupun subbagian perencanaan dan keuangan. Untuk Kegiatan Pemeliharaan Halaman Kantor, Pembuatan WC difabel, dan Pembuatan Tempat Parkir Mobil sedang dalam proses pengerjaan oleh pihak ketiga dengan mekanisme Belanja Langsung. Pengadaan Pagar Kantor Kecamatan Binuang juga masih dalam proses pengerjaan oleh Pihak ketiga dengan mekanisme tender. Untuk belanja makanan dan minuman sekretariat Triwulan III terlaksana dengan mekanisme e-purchasing, begitu juga belanja makan-minum rapat dan kegiatan lainnya. Laporan realisasi anggaran s.d 30 September 2023 dan Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Kas Bendahara Pengeluaran beserta data dukungannya sudah dibuat dan akan segera dikumpulkan ke Bagian Akuntansi BKAD Kabupaten Tapin.
 - b) Kasi Pembangunan
Target Kinerja pada triwulan III sudah tercapai. Pelayanan Rekomendasi dari Seksi Pembangunan berjalan lancar, begitu pula dengan monev Pembangunan di desa-desa juga sudah dilaksanakan dan disampaikan laporannya ke Camat Binuang. Untuk Musrenbangdes sudah terlaksana di semua desa. Untuk Musrenbang Kelurahan akan dilaksanakan di TW IV.
 - c) Kasi Pemerintahan
Target Kinerja pada triwulan III juga sudah tercapai sesuai rencana. Semua desa sudah menyampaikan laporan rekomendasi pencairan APBdes. Setiap Desa juga sudah mengumpulkan Perdes dan Perkades. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset desa juga sudah terlaksana di TW III ini.

- d) Kasi Kesra
Target Kinerja pada triwulan III juga sudah tercapai sesuai rencana. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan III ini ialah pelayanan rekomendasi SKTM, Rekomendasi Nikah, dan proposal permohonan bantuan. Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang sudah terlaksana diantaranya pembinaan persiapan lomba Jambore PKK, Lomba Hatinya PKK, dan Lomba Masak Serba Ikan. Selain itu juga terlaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Puskessos, Pelatihan Petugas Validasi DTKS (Bimtek), Kegiatan PHBS, dan Kegiatan Sosialisasi Pernikahan Dini, dan Kegiatan PHBI (Maulid Nabi Muhammad)
- e) Kasi Perekonomian
Target Triwulan III untuk seksi perekonomian juga tercapai sesuai rencana. Kegiatan pelayanan rekomendasi izin usaha mikro kecil terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan Monev BUMDes ke II juga sudah terlaksana. Kegiatan Sosialisasi Posyantek akan dilaksanakan di TW IV.
- f) Kasi Trantib
Target Kinerja pada triwulan III sudah tercapai. Semua aduan yang masuk ke Kecamatan Binuang sudah ditindaklanjuti dan selesai. Aduan tersebut diantaranya terkait penumpukkan sampah di TPS Balipat Binuang. Aduan ini sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan DLH Kab. Tapin agar sampah segera diangkut. Disepanjang TPS juga sudah dipasang spanduk agar masyarakat membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Untuk ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Binuang, kita terus berkoordinasi dengan Polsek, Koramil, dan Kepala Desa/Lurah.

Dari hasil monev ini dapat disimpulkan bahwa target kinerja triwulan III TA 2023 telah tercapai dengan baik. Diharapkan kegiatan monev ini dapat memupuk silaturahmi, motivasi, dan *teamwork* para pegawai untuk tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Binuang.

Notulis

Nelly Martati, S.Pd,MM

DOKUMENTASI KEGIATAN
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan III Tahun 2023
(Selasa, 3 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Kecamatan Binuang)



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
 Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang
 Acara : Rapat Koordinasi Internal
 Agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan III Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. Hendermanoor E.	Camat	Jl. Jawa	1
2	Esti S. R.	sekcam	Binuang	2
3	Nelly Hartati	Kaoubag Renku	Binuang	3
4	Edy T	KASITRANTIB	BNG	4
5	Hj. Aminah	Kasi Ekonomi	Binuang	5
6	H. Darmipati Ayu	KASI KEKRA	BINUANG	6
7	Jurhana Yati	Kah. Pembg	Bng	7
8	SYARANSYAH	STAF	BNG	8
9	Maya Rahman	Kasi Pem	Binuang	9
10	Rwani Jurni	Umpan	Binuang	10
11	Dinda Fatimah	STAF		11
12	Hatta Umar Dita	Bendahra		12
13	M. Mirza	STAFF		13
14	M. Marwan Alqodis	STAF		14
15	NORMA HIDAYATI	STAF		15
16	Rizki Alqotih	STAF		16
17	DHIYA SALSABILLA	STAF		17
18	Chainun Alisa	seklur	Raya Belanti	18
19	Aulia Sari	STAF		19
20	NOORHAMIPAH	Staff	Binuang	20

**Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023
Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin**

Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator IKU	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target IKU				Anggaran Rp	Realisasi IKU TW III	Unit Penanggung Jawab	
				TRIWULAN							Satuan
				I	II	III	IV				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					72,82	Score	72,65	Camat		
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)			0	0	24,58	0	Score	22,6	Camat	
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)			0	0	19,08	0	Score	22,5		
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)			0	0	10,62	0	Score	10,05		
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)			0	0	18,54	0	Score	15,50		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	25	25	25	25	%	4.622.699.912	75	Sekcam
			Persentase efisiensi penggunaan anggaran	25	25	25	25	%		75	
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	25	25	25	25	%		75	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	25	25	25	25	%		75	Kasubbag Renkeu
			Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	25	25	25	25	%	6.008.000	75	
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	25	25	25	25	%		75	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	2	1	Laporan	6.008.000	9	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	25	25	25	25	%		75	Kasubbag Renkeu
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	25	25	25	25	%	3.430.943.695	75	
			persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	25	25	25	25	%		75	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	32	32	Orang	3.426.145.295	32	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	Laporan	2.399.200	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	0	0	1	0	Laporan	2.399.200	1	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peringkatan kapasitas ASN				2	%		0	Kasubbag Umpeg
			Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat				70	Poin	589.123.121	0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	Paket	1.484.190	1	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	Paket	21.268.863	1	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Paket	66.483.776	9	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	3	Paket	4.890.292	9	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	Laporan	494.996.000	9	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	157.645.628	0	Kasubbag umpeg
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	0	10	Unit	157.645.628	2	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	2	Unit	371.583.000	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	238.537.280	0	Kasubbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3	3	Laporan	4.489.200	9	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	Laporan	44.781.840	9	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Laporan	189.266.240	9	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	200.442.188	0	Kasubbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	3	3	Unit	45.506.188	9	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	4	0	0	Unit	154.936.000	4	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			0	0	0	89	Poin		0	Camat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B			25	25	25	25	%		75	Camat
	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			25	25	25	25	%		75	

	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan		25	25	25	25	%		75	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	25	25	25	25	%	2.198.558.089	75	Camat
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi kegiatan keagamaan pada seksi Kesejahteraan Rakyat ditindaklanjuti	25	25	25	25	%	146.967.936	75	Kasi Kesra
		Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	25	25	25	25	%		75	Kasi Kesra
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat pada seksi Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjut	25	25	25	25	%		75	Kasi Kesra
		Persentase laporan pada seksi Pembangunan	25	25	25	25	%		75	Kasi Pembangunan
		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	25	25	25	25	%		75	Kasi Pembangunan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	0	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	4.417.500	12	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	Laporan	142.550.436	9	
	Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	100	%	2.051.590.153	0	Lurah Binuang, Lurah Raya Belanti, Lurah Karang Putih
		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25	25	25	25	%		75	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	6	Unit	741.420.000	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	12	12	12	Pokmas / Ormas	1.310.170.153	12	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	25	25	25	25	%	4.417.500	75	Camat
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan pada seksi Trantib Trantib	25	25	25	25	%	4.417.500	75	Kasi Trantib
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	Laporan	2.208.750	9	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	3	3	3	Laporan	2.208.750	9	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	25	25	25	25	%	23.065.490	75	Camat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat pada seksi Trantib yang ditindaklanjuti	25	25	25	25	%	23.065.490	75	Kasi Trantib
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	100	0	Orang	23.065.490	100	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		0	0	0	89	Poin		0	Camat
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan		25	25	25	25	%		75	Camat
	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik		25	25	25	25	%		75	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang sesuai ketentuan Dalam Pelayanan	25	25	25	25	%	37.590.194	75	Camat
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	25	25	25	25	%	37.590.194	75	Kasi Pemerintahan
		Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)	25	25	25	25	%			
		Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik	0	0	0	100	%		0	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	9	
	Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	24	24	24	Dokumen	8.835.000	72	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	9	
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	3	3	3	Laporan	22.128.944	9	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	9	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi kependudukan yang baik	25	25	25	25	%	36.226.000	75	Camat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kependudukan Desa/Kelurahan	11	11	11	11	Laporan	36.226.000	33	Kasi Pemerintahan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	Laporan	36.226.000	9	

Binuang, 10 Oktober 2023
 Camat Binuang,

 H. HENDERIYANTO, S.Kep.Ners, MM
 NIP. 19781001 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Binuang, 10 Januari 2024

Nomor : 000/14/BNG/SEKRT/I/2024
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi Internal
Kecamatan Binuang

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr/i

Pegawai Kantor
Kecamatan Binuang

Di Binuang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan IV Tahun 2023, Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I untuk berhadir pada acara Rapat Koordinasi Internal yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 11 Januari 2024

Waktu : Pukul 09:00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja
Triwulan IV Tahun 2023

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara Elektronik oleh :

Camat Binuang
Kabupaten Tapin

H. Henderiyanoor Efendi, S. Kep, Ners, MM
Penata Tk.I / (III/d)
NIP. 19860101 201101 1 015





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

NOTULEN

Hari/ Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang
Waktu : 09.00 - Selesai
Acara : Rapat Koordinasi Internal Kecamatan Binuang
Agenda : Monev Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
Pimpinan Rapat : H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners,MM
Notulis : Nelly Hartati, S.Pd,MM

Rapat dipimpin langsung oleh Camat Binuang, H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners,MM dan dihadiri sekretaris, para kasi dan kasubbag serta staf Kecamatan Binuang. Adapun poin yang disampaikan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi rencana aksi dan realisasi capaian Triwulan IV 2023 pada sekretariat dan tiap-tiap seksi Kecamatan Binuang.
2. Pembahasan mengenai serapan anggaran per 31 Desember 2023 dan kegiatan apa saja yang sudah berjalan dan bagaimana progresnya.
3. Penyampaian dari Sekretariat dan tiap-tiap seksi terkait capaian kinerja triwulan IV 2023.

a) Sekretariat

Target Kinerja pada triwulan IV ada yang tercapai 100% dan ada pula yang belum tercapai 100%. Namun tingkat capaian masuk dalam kategori "sangat tinggi"

Berikut Capaian Sekretariat Kecamatan Binuang hingga TW IV 2023:

- 1) Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja target 24,58 poin, tercapai 22,60
- 2) Nilai Komponen AKIP Pengukuran Kinerja 19,08 poin, tercapai 22,50
- 3) Nilai Komponen AKIP Pelaporan Kinerja 10,62 poin, tercapai 10,05
- 4) Nilai Komponen AKIP Evaluasi Internal 18,54 poin, tercapai 15,50
- 5) Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti target 100%, tercapai 100%
- 6) Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%, target 100%, tercapai 100%
- 7) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat target 70 poin, tercapai 71 poin

b) Kasi Pembangunan

Target Kinerja pada triwulan IV sudah tercapai yakni Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD tercapai 100%. Pelayanan Rekomendasi dari Seksi Pembangunan berjalan lancar dengan realisasi 100%. Begitu pula dengan monev Pembangunan di desa-desa juga sudah dilaksanakan dan disampaikan laporannya ke Camat Binuang.


c) Kasi Pemerintahan

Target Kinerja pada triwulan IV juga sudah tercapai sesuai rencana. Adapun Capaian Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan tercapai 100%.
- 2) Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) tercapai 100%
- 3) Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%, tercapai 100%

- 4) Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik, tercapai 100%
 - 5) Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik, tercapai 100%
- d) Kasi Kesra
Target Kinerja pada triwulan IV juga sudah tercapai sesuai rencana. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV ini ialah pelayanan rekomendasi SKTM, Rekomendasi Nikah, dan proposal permohonan bantuan tercapai 100%. Semua Kegiatan Pembinaan Masyarakat sudah terlaksana yakni Kegiatan Pendukung Program PKH, Kegiatan Penguatan Gizi Masyarakat, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Puskesmas, Kegiatan Keagamaan (MTQ), dan Pembinaan Lomba-Lomba TP PKK.
- e) Kasi Perekonomian
Target Triwulan III untuk seksi perekonomian juga tercapai sesuai rencana. Kegiatan pelayanan rekomendasi izin usaha mikro kecil terlaksana dengan baik 100%. Kegiatan Sosialisasi TTG di TW IV juga sudah terlaksana.
- f) Kasi Trantib
Target Kinerja pada triwulan IV sudah tercapai. Semua aduan yang masuk ke Kecamatan Binuang sudah ditindaklanjuti dan selesai 100%. Aduan di TW IV diantaranya, Para Petugas Kebersihan TPS Balipat memerlukan sekop dan garpu besi yang baru karena yang lama sudah rusak. Tindak lanjutnya ialah Pembelian Sekop dan Garpu besi baru untuk Petugas Kebersihan TPS Balipat Binuang dengan Anggaran Belanja Kecamatan Binuang TA 2023. Sekop dan Garpu besi baru diserahkan kepada petugas kebersihan TPS Balipat Binuang oleh Kasi Trantib Kecamatan Binuang. Untuk ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Binuang, kita terus berkoordinasi dengan Polsek, Koramil, dan Kepala Desa/Lurah.

Dari hasil monev ini dapat disimpulkan bahwa target kinerja triwulan IV TA 2023 telah tercapai dengan sangat baik. Diharapkan kegiatan monev ini dapat memupuk silaturahmi, motivasi, dan *teamwork* para pegawai untuk tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Binuang.

Notulis

Nelly Martati, S.Pd,MM

DOKUMENTASI KEGIATAN
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan III Tahun 2023
(Selasa, 3 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Kecamatan Binuang)



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Binuang
 Acara : Rapat Koordinasi Internal
 Agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	H. Henderiyanoor E	Camat	BNG		
2	Esti Pabo R	sekcam	Binuang		
3	Helly Hartati	Kasubbag Renku	BNG		
4	Hj. Aminah	Kasi Ekonomi	Binuang		
5	Edy T.	Kasi Trantib	BNG		
6	Syananayar	Staf			
7	Jurhana Yati	Kasi pemb.			
8	Wahid Tunar Dita	Berkas			
9	Hj. Darmiyati Ayu	Kasi Kesra			
10	Erwan Azpi	Umpan	Binuang		
11	M. Mirza	STAFF			
12	Dhifa Salsabila	Staf	BNG		
13	Dinda Fatimah	Staf	BNG		
14	M. Marwan Algiardi	Staf	BNG		
15	Aulia Sari	Staf	Binuang		
16	MURMA HIDAYATI	STAT	BINUANG		
17	Maya Rahuman	Kasi Pem	Binuang		
18	NOORHAMIFAH	Staff	Binuang		
19				19	
20					20

**Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023
Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin**

Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator IKU	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target IKU/Sasaran				Satuan	Anggaran Rp	Realisasi IKU TW IV	Unit Penanggung Jawab
				TRIWULAN							
				I	II	III	IV				
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan					89	Poin		89,03	Camat	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					72,82	Score		72,65		
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah					18,9	Poin		18,9		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja	0	0	24,58	0	Score	5.916.636.819	22,6	Sekcam
		Nilai Komponen AKIP Pengukuran Kinerja	0	0	19,08	0	Score	22,5			
		Nilai Komponen AKIP Pelaporan Kinerja	0	0	10,62	0	Score	10,05			
		Nilai Komponen AKIP Evaluasi Internal	0	0	18,54	0	Score	15,50			
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	0	0	0	100	%	100			
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	0	0	0	100	%	100			
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	0	0	0	70	Poin	71			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappeltbang	25	25	25	25	%	6.008.000	100	Kasubbag Renkeu
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	25	25	25	25	%	100			
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	25	25	25	25	%	100			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	2	1	Laporan	6.008.000	10	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	25	25	25	25	%	3.430.940.729	25	Kasubbag Renkeu
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	25	25	25	25	%	25			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	32	29	Orang	3.426.142.329	29	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	Laporan	2.399.200	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	0	0	1	0	Laporan	2.399.200	1	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas				2	%	944.623.284	3,45	Kasubbag Umpeg
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	25	25	25	25	%	100			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	Paket	65.532.966	0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	Paket	36.681.243	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Paket	91.571.506	0	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	3	Paket	21.809.413	0	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	Laporan	729.028.156	3	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	922.241.734	80	Kasubbag umpeg
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	0	140	Unit/Buah	476.013.806	142	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	1	Unit	446.227.928	1	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	333.231.456	80	Kasubbag Umpeg
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3	3	Laporan	6.045.456	12			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	Laporan	50.777.040	12			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Laporan	276.408.960	12			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	0	0	0	80	%	279.591.616	0	Kasubbag Umpeg		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	3	3	3	Unit	69.655.616	3			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	4	0	1	Unit	209.936.000	5			

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik			25	25	25	25	%		100	Camat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	25	25	25	25	%	36.226.000	100	Camat	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu	25	25	25	25	%	36.226.000	100	Kasi Pemerintahan	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	Laporan	36.226.000	12		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B			25	25	25	25	%	0	25	Camat	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	25	25	25	25	%	2.242.219.632	25	Camat	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	25	25	25	25	%	216.471.642	100	Kasi Pembangunan	
			Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesjahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	25	25	25	25	%		100	Kasi Kesra	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	0	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	4.417.500	12		
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	Laporan	212.054.142	12		
		Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	100	%	2.025.747.990	100	Lurah Binaung, Lurah Raya Belanti, Lurah Karang Putih	
			Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25	25	25	25	%		100		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	6	Unit	700.500.966	6	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	12	12	12	Pokmas / Ormas	1.325.247.024	12	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			25	25	25	25	%		100	Camat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	25	25	25	25	%	130.458.434	25	Camat	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya fasilitasi penguatan masyarakat yang tertangani	25	25	25	25	%	130.458.434	25	Kasi Trantib	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	3	3	3	Laporan	128.249.684	12		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	3	3	3	Laporan	2.208.750	12		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			25	25	25	25	%		25	Camat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	25	25	25	25	%	117.474.398	25	Camat	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya fasilitasi penguatan masyarakat yang tertangani	25	25	25	25	%	117.474.398	25	Kasi Trantib	
		Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	100	0	200	Orang	117.474.398	300		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan			25	25	25	25	%		0	Camat	
				25	25	25	25	%		0		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	25	25	25	25	%	37.590.194	100	Camat	
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	25	25	25	25	%		100		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	25	25	25	25	%	37.590.194	100	Kasi Pemerintahan	
			Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)	25	25	25	25	%				
			Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%	25	25	25	25	%				
			Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik	0	0	0	100	%		100		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	12			

		Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	24	24	24	Dokumen	8.835.000	96	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3	3	3	3	Dokumen	2.208.750	12	
		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	3	3	3	Laporan	2.208.750	12	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	3	3	3	Dokumen	22.128.944	12	



Binuang, Januari 2024
Camat Binuang,

H. HENDERWANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19781001 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

KECAMATAN BINUANG



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Nomor SOP	: 900/028/BNG/RENKEU/IX/2021
Tanggal Pembuatan	: 13 September 2021
Tanggal Efektif	: 13 September 2021
Disahkan Oleh	:  CAMAT <u>EKO HARYONO, SE,MM</u> NIP. 19781001 201001 1 013
Nama SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;4. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.5. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin.	<ol style="list-style-type: none">1. S-1/ SLTA2. Memiliki Kemampuan tentang pengolahan data3. Memahami Instrumen-instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.4. Memahami Renstra,LAKIP,IKU, PK Kecamatan Binuang5. Memiliki kemampuan Mengoperasikan MS Word dan MS Excel
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Renja.2. SOP Penyusunan LKIP3. SOP Pengumpulan Data Kinerja4. Renstra Kecamatan Binuang 2018-20235. PK (Perjanjian Kinerja) Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja dan rencana kerja.2. Perangkat Komputer dan Printer3. Data Realisasi Kegiatan.4. Alat Tuis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Pengukuran Data Kinerja ini akan menghambat Laporan Pertanggungjawaban Capaian Kinerja Kecamatan Binuang	Pada proses pengukuran data kinerja, data agar dapat diterima dan dihimpun tepat waktu oleh Kasubbag Program dari Kasi/Sub Bagian/seksi terkait di lingkungan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

**FLOWCHART SOP
MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KINERJA**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Camat	Sekcam	Kasubag Renkeu	Kasi	Staff	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris Kecamatan untuk Melaksanakan Permintaan Data Kinerja Triwulanan di Lingkup Kecamatan	(Mulai)						10 Menit	Disposisi Surat	
2	Menugaskan dan Memberi Pengarahan kepada Kasubbag Renkeu untuk Menyampaikan Format Permintaan Data Kinerja Triwulanan kepada masing-masing Kepala Seksi		[]	[]			Disposisi Surat	2 Jam	Disposisi Surat dan Arahan Sekcam	
3	Berkoordinasi dengan para Kepala Seksi untuk mengumpulkan, mempelajari, menghimpun data, dan Informasi Kinerja triwulanan serta menyerahkan kepada Kasubbag Renkeu		[]	[]	[]		Disposisi Surat dan Arahan Sekcam	3 Hari	Format Laporan Kinerja Individu Esselon IV	
4	Menyusun Data dan menyerahkan hasilnya kepada Kasubbag Renkeu					[]	Draft Laporan Kinerja Individu Esselon IV	1 Hari	Draft Laporan Kinerja Individu Esselon IV	
5	Menganalisa dan Mengevaluasi data dari Informasi Kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan Penyusunan Laporan Kinerja jika di setuju diserahkan ke Sekcam Bila tidak di kembalikan Ke Staff untuk perbaikan			{ } (Decision)			Draft Laporan Kinerja Individu Esselon IV	2 Jam	Draft Laporan Kinerja Individu Esselon IV yang telah Di Paraf Kasubbag Renkeu	
6	Memeriksa dan Meneliti Draft Dokumen Monev jika di setuju diserahkan ke Camat Bila tidak di kembalikan Ke Kasubbag Renkeu untuk perbaikan		{ } (Decision)				raft Laporan Kinerja Individu Esselon IV yang telah Di Paraf Kasubbag Renkeu	2 Jam	Draft Laporan Kinerja Individu Esselon IV yang telah di Di Paraf Sekcam	
7	Menandatangani Dokumen dan Menyerahkan Kepada Kasubbag Renkeu untuk di gandakan, di arsipkan dan di distribusikan	[] (Signature)		[]			Draft Laporan Kinerja Individu Esselon IV yang telah di Di Paraf Sekcam	15 Menit	Draft Laporan Kinerja Individu Esselon IV yang telah di tandatangani Camat	
9	Mengandakan, Mengarsipkan dan Mendistribusikan					(End)	Dokumen Laporan Kinerja Individu Esselon IV	1 Hari	Dokumentasi/ Pengarsipan Dokumen Laporan Kinerja Individu Esselon IV	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN DATA KINERJA**

KECAMATAN BINUANG

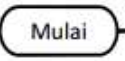
















PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Nomor SOP	: 900/027/BNG/RENKEU/IX/2021
Tanggal Pembuatan	: 13 September 2021
Tanggal Efektif	: 13 September 2021
Disahkan Oleh	:  CAMAT <u>EKO HARYONO, SE,MM</u> NIP. 19781001 201001 1 013
Nama SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PENGUKURAN DATA KINERJA
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;4. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.5. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin.	<ol style="list-style-type: none">1. S-1/ SLTA2. Memiliki Kemampuan tentang pengolahan data3. Memahami Instrumen-instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.4. Memahami Renstra,LAKIP,IKU, PK Kecamatan Binuang5. Memiliki kemampuan Mengoperasikan MS Word dan MS Excel
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Renja.2. SOP Penyusunan LKIP3. SOP Pengumpulan Data Kinerja4. Renstra Kecamatan Binuang 2018-20235. PK (Perjanjian Kinerja) Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja dan rencana kerja.2. Perangkat Komputer dan Printer3. Data Realisasi Kegiatan.4. Alat Tuis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Pengukuran Data Kinerja ini akan menghambat Laporan Pertanggungjawaban Capaian Kinerja Kecamatan Binuang	Pada proses pengkuran data kinerja, data agar dapat diterima dan dihimpun tepat waktu oleh Kasubbag Program dari Kasi/Sub Bagian/seksi terkait di lingkungan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

**FLOWCHART SOP
MEKANISME PENGUKURAN DATA KINERJA**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Camat	Sekcam	Kasubag Renkeu	Kasi	Staff	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk membuat Pengukuran Data Kinerja						Disposisi Surat	15 Menit	Disposisi Surat	
2	Membuat format Pengukuran Data Kinerja dari masing-masing seksi dan sekretariat						Format Pengukuran data kinerja	1 Hari	Dokumen format data	
3	Menyampaikan format pengukuran data kinerja kepada masing-masing seksi dan sekretariat						Format Pengukuran data kinerja	1 Hari	Dokumen format data	
4	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja						Darft Pengukuran Kinerja	1 Hari	Darft Pengukuran Kinerja	
5	Menghimpun Format Data dan Informasi Pengukuran Kinerja masing-masing seksi dan sekretariat						Draft Kinerja	3 Jam	Draft Kinerja	
6	Menganalisis data dan informasi pengukuran kinerja yang sudah terkumpul						Draft Pengukuran Kinerja	3 Jam	Draft Pengukuran Kinerja	
7	Membuat konsep pengukuran kinerja						Draft Pengukuran Kinerja	3 Jam	Draft Pengukuran Kinerja	
8	Mengkoreksi konsep Dokumen pengukuran kinerja						Dokumen Pengukuran Kinerja	2 Jam	Dokumen Pengukuran Kinerja	
9	Menandatangani Dokumen pengukuran kinerja		Tidak				Konsep Surat	15 Menit	Konsep Surat	
10	Mendokumentasikan Dokumen Pengukuran Kinerja				Tidak		Dokumen Pengukuran Kinerja yang telah di tanda tangani	30 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja yang telah di tanda tangani	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA KINERJA

KECAMATAN BINUANG



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Alamat : Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183
Posel : humas.kec.binuang@gmail.com

Nomor SOP	: 900/024/BNG/RENKEU/IX/2021
Tanggal Pembuatan	: 13 September 2021
Tanggal Efektif	: 13 September 2021
Disahkan Oleh	:  CAMAT EKO HARYONO, SE,MM NIP. 19781001 201001 1 013
Nama SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin.

Kualifikasi pelaksanaan :

1. S-1/ SLTA
2. Memiliki Kemampuan tentang pengolahan data
3. Memahami Instrumen-instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Memahami Renstra,LAKIP,IKU, PK Kecamatan Binuang
5. Memiliki kemampuan Mengoperasikan MS Word dan MS Excel

Keterkaitan :

1. SOP Renja
2. SOP Renstra Kecamatan Binuang 2018-2023
3. PK (Perjanjian Kinerja) Kecamatan

Peralatan dan Perlengkapan :

1. Lembar kerja dan rencana kerja.
2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Data Realisasi Kegiatan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Pengumpulan Data Kinerja ini tidak akan berjalan lancar dan akan mempengaruhi kinerja Kecamatan

Pada proses pengumpulan data kinerja, data agar dapat diterima dan dihimpun tepat waktu oleh Kasubbag Program dari Kasi/Sub Bagian/seksi terkait di lingkungan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

Identifikasi Kegiatan, Pelaksana & Mutu Buku :

SKPD : Kantor Kecamatan Binuang.

Sekretariat : Sekretariat Kecamatan Kasubbag. RENKEU.

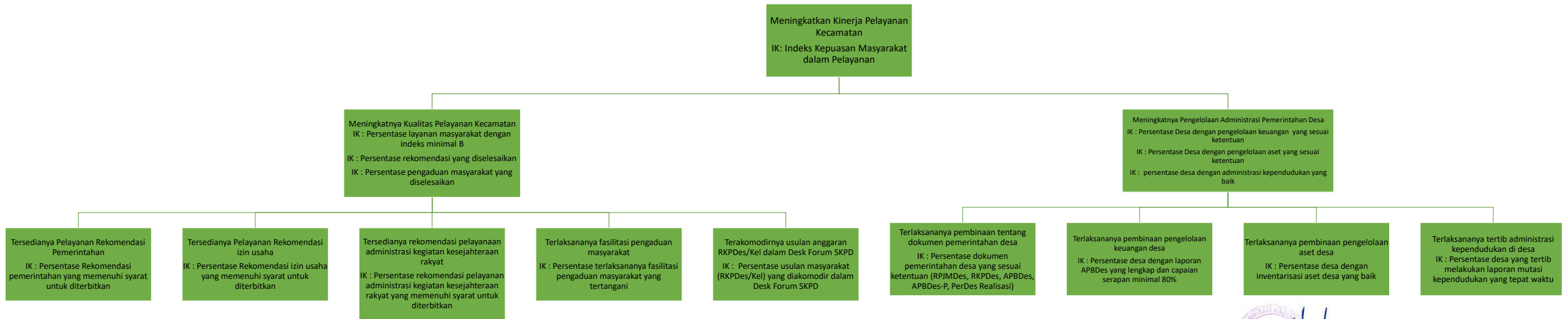
Aktivitas : SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO.	Kegiatan	Pelaksana	Buku Mutu			
			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memerintahkan untuk membuat Pengumpulan Data Kinerja	CAMAT SEKCAM KASUBBAG RENKEU	Disposisi Surat	15 Menit	Disposisi Surat	Disposisi Camat
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat	KASUBBAG RENKEU KASI./ KASUBBAG.	Format Pengumpulan data kinerja	1 Hari	Dokumen format data	Proses pembuatan
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kasi dan Kasubag	KASI./ KASUBBAG.	Format Pengumpulan data kinerja	2 Jam	Dokumen format data	Proses pembuatan
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Kasi dan Kasubag	KASI./ KASUBBAG.	Format Pengumpulan data kinerja	1 Hari	Rekap dokumen data isian	Proses pembuatan
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai Bahan Penyusunan laporan Kinerja	KASUBBAG RENKEU SEKCAM	Format Pengumpulan data kinerja	1 Hari	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja	Hasil Pembuatan

**FLOWCHART SOP
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Renkeu	Kasi/ Kasubbag	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk membuat Pengumpulan Data Kinerja					Disposisi Surat	15 Menit	Disposisi Surat	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format pengumpulan data kinerja	1 Hari	Dokumen format data	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kasi dan Kasubag					Format pengumpulan data kinerja	2 Jam	Dokumen format data	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Kasi dan Kasubag					Format pengumpulan data kinerja	1 Hari	Rekap dokumen data isian	
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai Bahan Penyusunan laporan Kinerja					Format pengumpulan data kinerja	1 Hari	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja	

LAMPIRAN 13. POHON KINERJA KECAMATAN BINUANG TAHUN 2023





 Camat Binuang,
 H. HENDERIYANOOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
 NIP 19860101 201101 1 015

POHON KINERJA SEKRETARIAT KECAMATAN BINUANG TAHUN 2023

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
IK: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
IK: Nilai Komponen AKIP

Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan
IK: Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah
IK1: Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN
IK 1: Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat
IK: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat

Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah
IK: Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang

Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah
IK 1: Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti
IK 2: Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
IK 1: Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan
IK 2: Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan dan pencatatan aset daerah/BMD
IK: Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan

Meningkatnya ASN yang berkualitas
IK: Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas

Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)
IK: Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik

Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian
IK: Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik



H. HENDERIYAN OOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

LAMPIRAN 14. CASCADING KECAMATAN BINUANG TAHUN 2023

ESSELON III	CAMAT		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	89,00 Poin	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100%	
	Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100%	
	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100%	
	Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100%	
	persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100%	

ESSELON IV	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN			KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN			KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT			KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN		
	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%	Tersedianya Pelayanan Rekomendasi izin usaha	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%	Tersedianya rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%	Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	75%	
Terlaksananya pembinaan tentang dokumen pemerintahan desa	Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)	100%													
Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 80%	100%													
Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset desa	Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik	100%													
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di desa	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu	100%													

Camat Binuang,

H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
NIP 19860101 201101 1 015

CASCADING KINERJA SEKRETARIAT KECAMATAN BINUANG TAHUN 2023

CAMAT		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.82 Score
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,9 Poin

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Pengukuran Kinerja) (Pelaporan Kinerja) (Evaluasi Internal)	Score 24.58 19.08 10,62 18.54

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 Poin

Kasubag Perenlap		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjut	100%
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%

Kasubag Keuangan		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	2%

Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80%
Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%



 Camat Binuang,

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners,MM
 NIP 19860101 201101 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Binuang
 Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.001 Kecamatan Binuang

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA	8.480.605.477,00	7.969.025.016,00	93,97	6.037.709.394,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.945.075.037,00	6.477.678.574,00	93,27	4.962.433.101,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.426.142.329,00	3.214.427.369,00	93,82	3.349.471.779,00
5.1.02	Belanja Barang	3.518.932.708,00	3.263.251.205,00	92,73	1.612.961.322,00
5.2	BELANJA MODAL	1.535.530.440,00	1.491.346.442,00	97,12	1.075.276.293,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	508.169.474,00	486.880.692,00	95,81	130.634.900,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	482.960.000,00	465.418.000,00	96,37	195.615.000,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	544.400.966,00	539.047.750,00	99,02	749.026.393,00
	SURPLUS / DEFISIT	(8.480.605.477,00)	(7.969.025.016,00)	0	(6.037.709.394,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.480.605.477,00)	(7.969.025.016,00)	0	(6.037.709.394,00)

Rantau, 17 Januari 2024

CAMAT BINUANG



H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep.Ners, MM.

NIP198601012011011015





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Benuang

Sub Unit : Kecamatan Benuang

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.008.000,00	0,00	6.008.000,00	0,00	6.008.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.008.000,00	0,00	6.008.000,00	0,00	6.008.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.426.142.329,00	3.214.427.369,00	0,00	0,00	3.214.427.369,00	93,82	211.714.960,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.399.200,00	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00	100,00	100,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.399.200,00	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00	100,00	100,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.430.940.729,00	3.214.427.369,00	4.798.200,00	0,00	3.219.225.569,00	93,83	211.715.160,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.532.966,00	0,00	65.203.000,00	0,00	65.203.000,00	99,50	329.966,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.681.243,00	0,00	36.499.680,00	0,00	36.499.680,00	99,51	181.563,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.571.506,00	0,00	87.014.840,00	0,00	87.014.840,00	95,02	4.556.666,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.809.413,00	0,00	21.709.254,00	0,00	21.709.254,00	99,54	100.159,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	729.028.156,00	0,00	716.122.873,00	0,00	716.122.873,00	98,23	12.905.283,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	944.623.284,00	0,00	926.549.647,00	0,00	926.549.647,00	98,09	18.073.637,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	476.013.806,00	0,00	14.004.000,00	455.416.704,00	469.420.704,00	98,61	6.593.102,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	446.227.928,00	0,00	0,00	340.856.988,00	340.856.988,00	76,39	105.370.940,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	922.241.734,00	0,00	14.004.000,00	796.273.692,00	810.277.692,00	87,86	111.964.042,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.045.456,00	0,00	6.040.000,00	0,00	6.040.000,00	99,91	5.456,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.777.040,00	0,00	50.770.090,00	0,00	50.770.090,00	99,99	6.950,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.408.960,00	0,00	275.631.360,00	0,00	275.631.360,00	99,72	777.600,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	333.231.456,00	0,00	332.441.450,00	0,00	332.441.450,00	99,76	790.006,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.655.616,00	0,00	68.851.152,00	0,00	68.851.152,00	98,85	804.464,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.936.000,00	0,00	154.250.000,00	0,00	154.250.000,00	73,47	55.686.000,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.916.636.819,00	3.214.427.369,00	1.506.902.449,00	796.273.692,00	5.517.603.510,00	93,26	399.033.309,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	279.591.616,00	0,00	223.101.152,00	0,00	223.101.152,00	79,80	56.490.464,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.226.000,00	0,00	36.225.900,00	0,00	36.225.900,00	100,00	100,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.226.000,00	0,00	36.225.900,00	0,00	36.225.900,00	100,00	100,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	36.226.000,00	0,00	36.225.900,00	0,00	36.225.900,00	100,00	100,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.417.500,00	0,00	4.417.300,00	0,00	4.417.300,00	100,00	200,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	212.054.142,00	0,00	212.022.548,00	0,00	212.022.548,00	99,99	31.594,00
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	216.471.642,00	0,00	216.439.848,00	0,00	216.439.848,00	99,99	31.794,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							



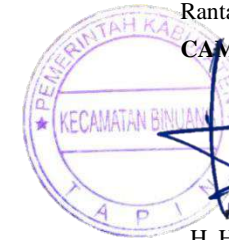
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	466.314.890,00	0,00	466.314.890,00	0,00	466.314.890,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	682.786.532,00	0,00	682.754.738,00	0,00	682.754.738,00	100,00	31.794,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	TOTAL KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	466.314.890,00	0,00	466.314.890,00	0,00	466.314.890,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	128.249.684,00	0,00	128.246.670,00	0,00	128.246.670,00	100,00	3.014,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.208.750,00	0,00	2.208.650,00	0,00	2.208.650,00	100,00	100,00
	TOTAL PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	130.458.434,00	0,00	130.455.320,00	0,00	130.455.320,00	100,00	3.114,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	130.458.434,00	0,00	130.455.320,00	0,00	130.455.320,00	100,00	3.114,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	117.474.398,00	0,00	117.469.148,00	0,00	117.469.148,00	100,00	5.250,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	117.474.398,00	0,00	117.469.148,00	0,00	117.469.148,00	100,00	5.250,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	117.474.398,00	0,00	117.469.148,00	0,00	117.469.148,00	100,00	5.250,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	100,00	0,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.835.000,00	0,00	8.832.050,00	0,00	8.832.050,00	99,97	2.950,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.208.750,00	0,00	2.205.900,00	0,00	2.205.900,00	99,87	2.850,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	0,00	2.208.750,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.128.944,00	0,00	13.105.200,00	0,00	13.105.200,00	59,22	9.023.744,00
Jumlah		<u>6.921.172.377,00</u>	<u>3.214.427.369,00</u>	<u>2.502.368.205,00</u>	<u>796.273.692,00</u>	<u>6.513.069.266,00</u>	<u>94,10</u>	<u>408.103.111,00</u>

Rantau, 17 Januari 2024

CAMAT BINUANG



H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep.Ners, MM.
NIP198601012011011015

